



**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Jambi)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

IVANA KRISTINA HUTASOIT

NIM. C1C017094

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI**

2024

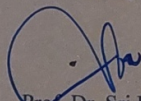
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Ivana Kristina Hutasoit
NIM : C1C017094
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Jambi).

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku untuk mengikuti Ujian Komprehensif dan Skripsi pada tanggal di bawah ini.

Pembimbing Utama

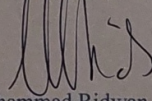


Prof. Dr. Sri Rahayu, S.E., M.S.A., A.k., CA

NIP. 197610282001122002

Jambi, Januari 2024

Pembimbing Pendamping

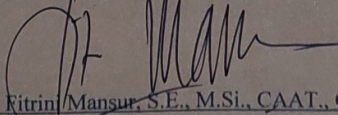


Muhammad Ridwan, S.E., M.Sc

NIP. 198209242006041002

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Hj. Fitriani Mansur, S.E., M.Si., CAAT., CIQnR

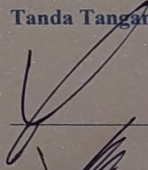
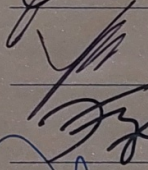
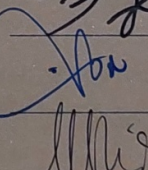
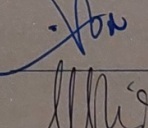
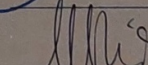
NIP. 197311121998022002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Komprehensif dan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada :

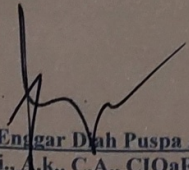
Hari : Rabu
Tanggal : 28 Februari 2024
Jam : 08.30 s/d 09.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	: Dr. Yudi, S.E., M.S.A.	
Penguji Utama	: Dr. Yuliusman, S.E., M.Si., Ak., CA., CIQnR.	
Sekretaris	: Fredy Ollimsar, S.E., M.Si., CIQnR.	
Anggota 1	: Prof. Dr. Sri Rahayu, S.E., M.S.A., A.k. CA	
Anggota 2	: Muhammad Ridwan, S.E., M.Sc	

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E.,
M.Si., Ak., C.A., CIQnR., CIQnR.,
CIT.
NIP. 197610032000122001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Junaidi, S.E., M.Si.
NIP. 196706021992031003

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ivana Kristina Hutasoit

Nomor Mahasiswa : C1C017094

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Jambi).

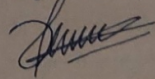
Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini adalah karya asli penulis, selama proses penulisan penulis tidak melakukan kegiatan plagiat atas karya ilmiah orang lain, semua petikan yang saya ajukan dalam skripsi ini sesungguhnya ada dan disiapkan dengan kaedah ilmu penulisan.
2. Apabila dikemudian hari didapati ketidaksesuaian sebagaimana yang tercantum dalam poin (1), maka saya siap menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya telah peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Ivana Kristina Hutasoit
NIM. C1C017094

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Jambi)**. Dengan baik dan pada waktunya.

Penyusunan Skripsi ini ditunjukkan sebagai salah satu syarat untuk persyaratan akademik dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

Penyusunan Skripsi ini sangat diupayakan semaksimal mungkin menyadari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga mengalami kendala dalam proses penyelesaian Skripsi ini. Namun, berkat bimbingan, arahan, motivasi, perhatian, dan bantuan secara moral dan material dari pihak, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam membuat Skripsi ini.

Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. H. Juanidi, S.E., M.Si. selaku Dekan beserta segenap Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E., M.Si., Ak. C.A., CIQaR., CIQn., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Bapak Dr. Rico Wijaya Z, S.E., M.Si., Ak. CIQnR. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
5. Ibu Dr. Hj. Fitrini Mansur, S.E., M.Si., CIQnR. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

6. Ibu Prof. Dr. Sri Rahayu, S.E., M.S.A., A.k., CA. selaku dosen pembimbing utama yang memberikan peneliti kesempatan, perhatian dan dorongan penuh untuk terus berkembang sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Ridwan, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing pendamping yang penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan arahan, koreksi dan saran yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Ibu Dr. Rita Friyani, S.E., M.Si, CMGRCP. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengawasi dan membimbing saya selama saya berkuliah di Universitas Jambi.
9. Bapak Ibu Dosen serta Karyawan di Lingkungan Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan yang telah terlibat dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi peneliti selama peneliti menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
10. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak B. Hutasoit dan Ibu N. Br Sitompul serta adik-adik peneliti Alex, Amanda dan Albert, yang selalu sabar dan terus memberikan support dan doa serta meyakinkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga serta saudara-saudara yang turut memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman terdekat yang terkasih Wanty, Mingka, Krisna, dan Mita yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Rain's family Sindy, Dewi, Mawar, Shinta, Putri, Reni dan Herdaswita yang sudah lebih dahulu menyelesaikan perkuliahannya namun selalu ada dan memberikan semangat serta membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Pemuda-pemudi dan jemaat MR II Jambi yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta mendukung kepada peneliti.
15. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Angkatan 2017 yang membantu dan memberikan semangat kepada peneliti.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti semoga mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan.

Jambi, Februari 2024
Hormat Saya,

Peneliti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Organisasi yang dihardirkan sebagai responden dalam penelitian ini adalah BPKAD Kota Jambi dengan responden sebanyak 54 orang. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kuesioner yang disebarkan kepada para responden secara langsung. Analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* SPSS 25. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: Sistem, Informasi, Pengendalian, Kompetensi, Komitmen, Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of accounting information systems, internal control systems, human resource competencies, and organizational commitment to the quality of local government financial statements. This research is a quantitative research. The organization that was rebuked as respondents in this study was BPKAD Jambi City with 54 respondents. The research data used in this study came from questionnaires distributed to respondents directly. Data analysis and hypothesis testing using multiple linear regression analysis with the help of SPSS 25 software. The results of the analysis show that the accounting information system and internal control system affect the quality of local government financial statements, while human resource competence and organizational commitment do not affect the quality of local government financial statements.

Keywords: System, Information, Control, Competence, Commitment, Quality of Financial Statements.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Laporan Keuangan	12
2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	13
2.1.3 Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah.....	14
2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi	18
2.1.5 Sistem Pengendalian Internal.....	21
2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	23
2.1.7 Komitmen Organisasi.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Berpikir	28
2.3.1 Hubungan antara Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	29

2.3.2	Hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	29
2.3.3	Hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	30
2.3.4	Hubungan antara Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	31
2.4	Model Penelitian	31
2.5	Hipotesis Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....		33
3.1	Jenis dan Sumber Data	33
3.1.1	Jenis Data	33
3.1.2	Sumber Data	33
3.2	Populasi dan Sampel	33
3.2.1	Populasi	33
3.2.2	Sampel.....	33
3.3	Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	34
3.4	Operasional Variabel Penelitian.....	35
3.5	Teknik Analisis Data	37
3.5.1	Statistik Deskriptif	38
3.5.2	Uji Kualitas Data	38
3.5.2.1	Uji Validitas	38
3.5.2.2	Uji Reliabilitas	38
3.5.3	Regresi Linear Berganda.....	38
3.5.4	Uji Hipotesis Penelitian.....	39
3.5.4.1	Uji F (<i>F test</i>).....	39
3.5.4.2	Uji t (<i>t-test</i>).....	40
3.5.4.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Hasil Penelitian	42
4.1.1	Tentang BPKAD Kota Jambi	42
4.1.2	Visi dan Misi BPKAD Kota Jambi.....	43
4.1.3	Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Jambi	43
4.1.4	Struktur Organisasi BPKAD Kota Jambi.....	59
4.2	Deskripsi Data Penelitian	61
4.2.1	Demografi Responden.....	62
4.2.2	Statistik Deskriptif	67
4.2.3	Uji Validitas.....	69
4.2.4	Uji Reliabilitas	72

4.2.5	Analisis Regresi Linear Berganda	73
4.2.6	Pengujian Hipotesis	75
4.3	Pembahasan	78
4.3.1	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	79
4.3.2	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	81
4.3.3	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	83
4.3.4	Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	87
BAB V	PENUTUP	90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Keterbatasan.....	90
5.3	Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Opini BPK atas LKPD Tahun 2012 s.d 2020 Wilayah Kota Jambi.....	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1	Sampel	34
Tabel 3.2	Skor/Bobot Penilaian Menggunakan Skala Likert	35
Tabel 3.3	Operasional Variabel Penelitian.....	36
Tabel 3.4	Kriteria Penafsiran Indeks Korelasi	41
Tabel 4.1	Data Sampel Penelitian.....	61
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia	63
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	63
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	64
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jabatan.....	65
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Bekerja.....	67
Tabel 4.8	Hasil Analisis Deskriptif Statistik	68
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas Indikator Sistem Informasi Akuntansi (X_1)	69
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas Indikator Sistem Pengendalian Internal (X_2)	70
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3)	70
Tabel 4.12	Hasil Uji Validitas Indikator Komitmen Organisasi (X_4).....	71
Tabel 4.13	Hasil Uji Validitas Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	71
Tabel 4.14	Hasil Uji Reliabilitas	73
Tabel 4.15	Hasil Regresi Linear Berganda	73
Tabel 4.16	Hasil Uji F.....	75
Tabel 4.17	Hasil Uji t.....	76
Tabel 4.18	Hasil Uji Determinasi	77

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Model Penelitian.....	31
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPKAD Kota Jambi	59

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Kuesioner Penelitian	99
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian	108
Lampiran 3	Tabulasi Kuesioner.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Keberhasilan pemerintah dan pembangunan daerah ditentukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan dituntut untuk tertib, transparan dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (Pujanira, 2017).

Seiringnya perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Kiranayanti dan Erawati, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kemudian direvisi kembali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah, keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Nurcholis (2011) menjelaskan bahwa melalui sistem pemerintah daerah, Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasinya sendiri. Dalam hal ini pengambilan keputusan berada di daerah, begitu juga tentang pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang terdiri dari, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya pengambilan kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang.

Suwardjono (2008) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non-bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat penilaian setiap tahunnya berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan setiap Kabupaten/Kota wajib mengirimkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Tahun Anggaran yang berlaku kepada Badan Pengawas Keuangan tepat pada waktunya. Informasi memegang peran yang sangat penting untuk mengetahui kegiatan apa yang telah terjadi, melakukan evaluasi apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjamin agar data tersebut dapat diolah secara efisien menjadi informasi yang akurat, dapat dipercaya, dan tepat waktu maka dalam pengolahan data tersebut diperlukan suatu alat yang dinamakan sistem informasi (Zulfah dkk, 2017). Informasi adalah data yang diproses dan pemakai melakukan suatu tindakan yang dapat ia lakukan atau tidak dilakukan (Hall, 2008).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dioptimalkan menggunakan alat bantu teknologi informasi yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi dirancang sedemikian rupa oleh suatu organisasi atau lembaga sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, dengan sistem informasi akuntansi yang layak dapat dihasilkan suatu laporan yang mampu memberikan berbagai informasi yang berguna bagi pihak-pihak pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi (Bodnar dan Hopwood, 2000).

Pada umumnya tujuan pemanfaatan sistem informasi pada instansi pemerintah lebih menekankan pada tingkat pengurangan kesalahan dalam memproses transaksi yang selama ini dilakukan secara manual dan memberikan informasi laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Pemanfaatan sistem informasi ini dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan, sehingga memberikan dampak yang luar biasa mengingat instansi pemerintah merupakan sektor publik yang paling tinggi tingkat ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemrosesan (Rama dan Jones, 2006).

Sistem Pengendalian Internal diperlukan untuk mendukung terciptanya kualitas dan keyakinan yang memadai atas informasi laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem pengendalian internal meliputi keseluruhan organisasi dan semua kebijakan atau ketentuan organisasi yang telah dikoordinasikan untuk melindungi harta, mempertahankan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mengendalikan kegiatan internal.

Penyusunan LKPD harus berdampingkan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), bahwa tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (Safridha, 2020). Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah informasi akuntansi keuangan yang berkualitas (Aprilia, 2019).

Struktur pemerintahan daerah, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, dan aset yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian harus diisi oleh orang yang tepat. Begitu juga pada bagian keuangan yang harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan yang terkait lainnya. Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Diani, 2014).

Selain kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi juga diperlukan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai organisasi. Komitmen organisasi akan menimbulkan rasa memiliki pegawai terhadap organisasi, sehingga memunculkan tanggungjawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Steers (1988) dalam Dewi (2020) mengatakan, komitmen organisasi menjelaskan kekuatan relatif dari sebuah identifikasi individu dengan keterlibatan dalam sebuah organisasi. Komitmen menghadirkan sesuatu lebih dari loyalitas terhadap organisasi, disamping itu hal ini suatu hubungan yang aktif dengan organisasi dimana individu bersedia untuk memberikan sesuatu dari diri mereka untuk membantu keberhasilan dan

kemakmuran organisasi.

Membangun komitmen dalam organisasi diperlukan untuk mengembangkan dan memelihara informasi akuntansi dalam bagian integral dari pelayanan dan pengambilan keputusan. Dengan adanya komitmen terhadap organisasinya, maka setiap pekerja akan mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasinya dan termotivasi melaporkan segala aktivitasnya termasuk dalam hal menjalankan laporan keuangan (Mutiana dkk, 2017). Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pegawai atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pegawai membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi.

Dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk wilayah Kota Jambi Tahun 2012 s.d 2020, opini yang diperoleh Kota Jambi dapat dikatakan cukup memuaskan. Ini dikarenakan peningkatan opini yang diperoleh terhadap laporan keuangan pada tahun 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Provinsi Jambi dan bertahan hingga tahun 2020. Namun walaupun Kota Jambi menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tidak menutup kemungkinan adanya temuan atau kelemahan yang terdapat pada Laporan Keuangan Kota Jambi.

Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada:

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan informasi laporan keuangan;
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern; dan
4. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tujuh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut, artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi dan

Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2017 telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain Opini atas Laporan Keuangan, BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Kota Jambi sendiri, terdapat temuan-temuan yang menunjukkan kualitas laporan keuangan yang masih perlu ditingkatkan adalah sebagai berikut:

- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak dapat ditelusuri rinciannya pada DBMD sebesar Rp7,88 miliar dan minimal sebesar Rp4,94 miliar tidak diketahui keberadaannya;
- b. Kesalahan penganggaran Belanja Modal sebesar Rp43,91 miliar;
- c. Kekurangan volume atas 20 Paket Pekerjaan pada Dinas PUPR sebesar Rp1,47 miliar.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi mengatakan bahwa pada tahun 2018 Kota Jambi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, BPK menyebutkan bahwa masih ditemukannya temuan atas kesalahan penganggaran belanja modal sebesar Rp41,61 miliar, pengendalian pembayaran belanja tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD tidak memadai, serta penatausahaan dan pencatatan Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak sesuai ketentuan. Sedangkan temuan atas kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah kekurangan volume pekerjaan atas 29 paket pada dua Perangkat Daerah sebesar Rp1,76 miliar.

BPK Perwakilan Provinsi Jambi kembali menyatakan bahwa Kota Jambi memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019. Namun BPK kemudian menemukan kembali kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak mempengaruhi secara material kewajaran LK Tahun 2019. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Kesalahan Klasifikasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Belanja Hibah Dalam Penganggaran dan Realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran;

- 2) Penyajian dan Pengukuran Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan Tidak Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- 3) Penatausahaan dan Penyajian Aset Tetap yang Diperoleh dari Pelimpahan Kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan Belum Memadai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, Kota Jambi kembali meraih opini WTP atas LKPD TA 2020. Atas opini tersebut dikutip dari Siaran Pers BPK menyebutkan bahwa BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

1. Penetapan pajak terutang untuk jenis pajak *self assessment* tidak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
2. Pembayaran dan perhitungan Insentif Pemungutan Pajak Daerah tidak sesuai ketentuan dalam PP Nomor 69 Tahun 2010;
3. Pembayaran dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada empat perangkat daerah tidak sesuai ketentuan;
4. Kekurangan volume dan kelebihan pembayaran serta pekerjaan tidak sesuai kontrak pada 13 paket pekerjaan Jalan di Dinas PUPR;
5. Pengelolaan BMD berupa Tanah belum memadai dan sah.

Dalam Siaran Pers BPK tersebut, BPK berharap agar hasil pemeriksaan yang telah disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan secara bersama-sama selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel.

Tabel 1.1
Opini BPK atas LKPD Tahun 2012 s.d 2020
Wilayah Kota Jambi

No	Entitas	Opini								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Jambi	WDP	WDP	WDP	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : (www.jambi.bpk.go.id)

Penelitian terkait Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti, Zulfah dkk, (2017) dan Leiwakabessy (2020), ini dilakukan untuk mengetahui apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian Zulfah dkk, (2017) mengatakan bahwa Sistem informasi akuntansi mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan hasil penelitian Leiwakabessy (2020) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terkait Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti, Lestari (2020) dan Leiwakabessy (2020), ini dilakukan untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian Lestari (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian Leiwakabessy (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas LKPD di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Terkait Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti seperti, Leiwakabessy (2020) dan Qomah (2021), ini dilakukan untuk mengetahui

apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian Leiwakabessy (2020) menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun pada hasil penelitian Qomah (2021) menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian terdahulu terkait Komitmen Organisasi dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti: Maksyur (2015) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, Saifudin dan Rizki (2020) menunjukkan hasil bahwa Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saifudin dan Rizki Nur Aprilia (2020) dengan judul penelitian “Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Rizki Nur Aprilia (2020), terdapat satu pembeda pada variabel independen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Sistem Informasi Akuntansi sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Rizki Nur Aprilia menggunakan variabel independen Teknologi Informasi. Peneliti memilih menggunakan variabel Sistem Informasi Akuntansi dikarenakan pada beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Dewi (2020) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Artana (2016) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan

Keuangan. Terdapat juga perbedaan pada objek penelitian yaitu di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi sedangkan pada penelitian Saifudin dan Rizki Nur Aprilia (2020) menggunakan objek penelitian pada OPD Kota Semarang.

Dari hasil uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Jambi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi?
4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi.

4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

1. Bagi peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pengetahuan peneliti dalam bidang sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah jika suatu saat berkesempatan bekerja dalam lingkup pemerintah daerah nantinya.

2. Untuk Instansi Pemerintah Kota Jambi

Sebagai bahan informasi pelengkap atau sebagai masukan sekaligus pertimbangan bagi pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menghasilkan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP Nomor 71 Tahun 2010). Menurut penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti SAP yang telah diterima secara umum.

Laporan keuangan menurut Sundjaja (2002) adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Sementara menurut Munawir (2002) laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat memberikan informasi tentang suatu keadaan perusahaan sekaligus merupakan alat komunikasi antara data keuangan dengan pihak yang berkepentingan dengan data organisasi tersebut. Laporan keuangan sebagai hasil proses dari akuntansi merupakan penghubung antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan yaitu dengan memberikan informasi relevan yang bermanfaat bagi pihak tersebut untuk mengetahui keadaan dan perkembangan perusahaan bersangkutan.

Menurut Irham (2012) laporan keuangan adalah produk akhir dari akuntansi yang nantinya akan dianalisa lebih lanjut oleh pihak yang berkepentingan sebelum mengambil keputusan. Sementara menurut Nordiawan (2007) laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku lalu diterbitkan, laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Menurut Harahap (2002) mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sementara menurut APB (2002) laporan keuangan adalah suatu alat dengan mana informasi dikumpulkan dan diproses dalam akuntansi keuangan yang akhirnya dimasukkan dalam laporan yang dikomunikasikan secara periodik kepada para pemakainya. Menurut BAPEPAM laporan keuangan yang lengkap meliputi: neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara periodik dan periode yang biasanya digunakan adalah tahunan yang mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Sistem desentralisasi digunakan pada akuntansi pemerintah daerah (Untary, 2015). Desentralisasi itu sendiri dapat diartikan adanya pelimpahan sebagian wewenang dari pejabat terhadap pejabat dibawahnya untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab terkait dengan alokasi sumber daya dan pelayanan jasa terhadap masyarakat (Miah dan Mia, 1996 dalam Karyanti 2010).

Dalam struktur pemerintahan daerah Menurut Untary (2015), satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen – dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah :

- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Neraca,

- c. Laporan Operasional,
- d. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik sebagaimana bunyi penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.3 Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan. Informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah digunakan sebagai dasar

untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai yang membutuhkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut (1) relevan, (2) keandalan, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

1. Relevan (*relevance*) Informasi laporan keuangan dikatakan relevan, apabila informasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai pengambilan keputusan. Dengan demikian informasi dalam laporan keuangan biasa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.
2. Keandalan (*reliability*) Informasi dalam laporan keuangan dikatakan andal atau dapat diandalkan (*reliable*) apabila pengguna pelaporan keuangan dapat mengandalkan informasi yang menggambarkan kondisi ekonomi atau kejadian-kejadian. Informasi tersebut berarti netral yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kata secara jujur (*faithful representation*), serta dapat diverifikasi (*verifiability*), hubungan relevansi dan keandalan sangatlah penting. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
3. Dapat dibandingkan (*comparability*) Karakteristik kualitatif laporan keuangan ini memungkinkan pengguna untuk membandingkan persamaan dan perbandingan persamaan dan perbedaan informasi keuangan baik secara waktu maupun entitasnya. Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan apabila kebijakan akuntansi yang diterapkan sama dari tahun ketahun atau antar

entitas. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan kebijakan akuntansi maka pengaruh perubahan tersebut harus dapat diungkapkan dalam rangka mempermudah perbandingan tersebut. Sebagai contoh, apabila suatu kementerian menggunakan metode saldo menurun maka perubahan tersebut harus diberikan alasan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

4. Dapat dipahami (*understandability*). Karakteristik kualitatif ini merupakan ukuran kegunaan informasi laporan keuangan bagi pengguna. Apabila informasi tersebut tidak dapat dipahami pengguna maka informasi tersebut menjadi tidak ada gunanya. Untuk itu, informasi tersebut harus dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang umum diterima atau sesuai dengan batas pemahaman para pengguna. Disisi lain, mengingat beragamnya pengguna, maka pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi yang terkait.

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap *output* pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan (Setyowati, 2016). Kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Roviyantie, 2011). Kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan

keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat.

Menurut Lestari (2020), terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat. Dalam penelitian (Silviana, 2014) pada pemerintah Kabupaten di seluruh Jawa Barat, menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Mahaputra (2014) salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Pengendalian internal pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Sistem Pengendalian Internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan serta kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini senada dengan penelitian Hamdani (2011) yang memperoleh hasil sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh bidang akuntansi, oleh karenanya diperlukan SDM yang kompeten dalam menyusun

dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk menunjang hal tersebut, laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan berkompeten dalam melaksanakan akuntansi keuangan pemerintah serta organisasi tentang pemerintahan (Setyowati, 2016). Kemampuan SDM itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas. Kompetensi SDM dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas (Roviyantie, 2011).

2.1.4 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Laudon & Laudon, 2000). Akuntansi dan sistem informasi sangat berkaitan erat dimana kaitan yang erat ini tercermin dalam penggunaan istilah informasi akuntansi yang menyangkut semua kegiatan dan semua pihak yang terlibat dalam institusi. Akuntansi sebagai sistem informasi ekonomi dan keuangan mampu memberikan manfaat bagi pemakai, agar informasi akuntansi dapat diolah secara baik, diperlukan suatu mekanisme atau kegiatan yang baik pula. Sistem pengolahan yang baik terdiri dari prosedur, metode atau cara dan teknik yang memungkinkan data ini akan melibatkan manusia sebagai penunjang pencapaian tujuan.

Tujuan sistem informasi akuntansi menurut Hall (2008) adalah sebagai berikut:

1. Mendukung operasional harian. Sistem informasi menyediakan informasi bagi personel operasi untuk membantu mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif.
2. Mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Kepengurusan merujuk kepada tanggungjawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya ke pemakai eksternal melalui laporan

keuangan tradisional dan laporan-laporan yang diminta lainnya. Secara eksternal, pihak manajemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai laporan pertanggungjawaban.

3. Mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi memberikan informasi yang diperlukan para manajer untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan.

Sedangkan kegunaan sistem informasi akuntansi seperti yang dipaparkan Rama dan Jones (2006) adalah sebagai berikut:

1. Mendukung perencanaan dan pengendalian. Di mana informasi yang berkenaan dengan anggaran dan biaya standar disimpan dalam sistem informasi, kemudian laporan dirancang untuk membandingkan antara anggaran dengan aktual. Disinilah peran sistem informasi untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian.
2. Menerapkan pengendalian internal. Pengendalian internal termasuk kebijakan perusahaan, prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset organisasi dari kerugian atau kehilangan, dan untuk memelihara keakuratan data financial.
3. Mendukung aktivitas rutin. Para pimpinan membutuhkan sistem informasi akuntansi untuk menangani aktivitas operasi rutin selama siklus operasi organisasi berjalan.
4. Mendukung pengambilan keputusan. Informasi juga dibutuhkan untuk mendukung pengambil keputusan non-rutin pada semua tingkatan organisasi.

Menurut Azhar Susanto (2013) komponen-komponen sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. *Hardware.*
2. *Software.*
3. *Brainware.*
4. Prosedur.
5. Database dan Sistem Manajemen Database.
6. Teknologi Jaringan Telekomunikasi.

Adapun penjelasan mengenai komponen-komponen sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. *Hardware*

Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.

2. *Software*

Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. *Software* dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Software* sistem operasi dan *Software* sistem aplikasi.

3. *Brainware* (Sumber Daya Manusia)

Brainware (Sumber Daya Manusia) adalah sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian, dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut.

4. Prosedur

Prosedur merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

5. Database dan Sistem Manajemen Database

Sistem database merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. Database terdiri dari media dan sistem penyimpanan data dan sistem pengolahan.

6. Teknologi Jaringan Telekomunikasi

Sistem telekomunikasi merupakan kumpulan *hardware* dan *software* yang sesuai (*compatible*) yang disusun untuk mengkomunikasikan berbagai macam informasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dengan demikian dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi tidak hanya dibutuhkan operator yang menjalankannya, karena pada dasarnya operator yang menjalankan sistem

harus berpedoman pada prosedur-prosedur dan didukung oleh infrastruktur teknologi seperti *software*, komputer, dan peralatan pendukung lainnya. Tanpa itu sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik.

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga, bupati/walikota dan gubernur. Pada Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, maka dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, indikator sistem pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam

lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian pada sistem pengendalian internal dilakukan dengan menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) secara tertulis.

2. Penilaian Resiko. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan: a) Tujuan instansi pemerintah, b) Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, c) Identifikasi risiko, d) Analisis risiko, e) Mengelola risiko selama perubahan. Penilaian risiko pada sistem pengendalian internal dilakukan dengan menerapkan penentuan batas dan penentuan toleransi terhadap penilaian risiko.

3. Kegiatan Pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian pada sistem pengendalian internal dilakukan dengan menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap risiko kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Informasi dan komunikasi pada pengendalian internal dilakukan dengan menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggungjawab.

5. Pemantauan Pengendalian Internal. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan melalui: a) Pemantauan berkelanjutan, b) Evaluasi terpisah, c) Penyelesaian audit/tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan pengendalian internal dilakukan dengan melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit dan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan.

Apabila sistem pengendalian internal suatu organisasi lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam

penyajian laporan keuangan organisasi sangat besar. Sistem pengendalian internal juga merupakan sarana untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, dan memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah (Saifudin, 2020).

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Ketenagakerjaan, Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada didalamnya (Syarifudin, 2014). Dalam organisasi publik, peran SDM lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi SDM pada setiap level manajemen menjadi *urgen* baik level pimpinan maupun staf pemerintahan.

Rusvianto dkk, (2018) menyatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Kualitas informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Suatu sistem yang sebaik apapun akan sia-sia begitu saja, apabila tidak ditunjang oleh kualitas SDM yang memadai khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Komarasari, 2016). Pada dasarnya, sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumber daya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan (Safridha, 2020).

Pengambilan keputusan yang terbaik yang dihasilkan oleh suatu sumber daya manusia menunjukkan kinerja seseorang dan kemampuannya untuk menganalisis suatu masalah dalam lingkup kerja dan jabatannya. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari kejelian dan ketepatan dalam proses menentukan seorang pegawai untuk berada dalam suatu pekerjaan dan jabatan tertentu. Pegawai yang mampu melakukan pekerjaan tertentu mungkin akan lebih tepat dan baik jika dia ditempatkan pada bidang tertentu juga. *The right man on the right place*, akan membawa suatu organisasi pada hasil kinerja yang maksimal dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam tugas atau pekerjaan (Sutrisno, 2009).

Sumber daya manusia diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Agar menjadi sebuah kekuatan, sumber daya manusia harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya. Kompetensi menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan atau fungsi jabatan. Standar kompetensi mencakup tiga hal yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) yaitu fakta dan angka dibalik aspek teknis.
2. Keterampilan (*skills*) yaitu kemampuan untuk menunjukkan tugas pada tingkat kriteria yang dapat diterima secara terus-menerus dengan kegiatan yang paling sedikit.
3. Sikap (*attitude*) yaitu yang ditunjukkan kepada pelanggan dan orang lain bahwa yang bersangkutan mampu berada dalam lingkungan kerjanya.

Sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan akuntansi atau yang memiliki pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam organisasi karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Dari definisi tersebut, diketahui bahwa kapasitas sumber daya manusia

menunjang organisasi dengan karya, bakat, kreativitas, dan dorongan. Meskipun sempurna aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai.

Menurut Putri Syukria Lubis (2018), indikator kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat dari berbagai dimensi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi

Kompetensi sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan, sehingga meningkatkan kecakapan manajerial pegawai dan pelayanan pegawai setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan.

3. Pengalaman di Bidang Keuangan

Pengalaman di bidang keuangan, yaitu sumber daya manusia yang memahami teori keuangan, memahami aturan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PP No. 70 tahun 2010, dan mampu mengkomunikasikan hasil dari laporan keuangan.

2.1.7 Komitmen Organisasi

Komitmen merupakan keadaan individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Dalam instansi pemerintah sangat dibutuhkan komitmen karyawan dalam mencapai keberhasilan tujuan organisasi, serta untuk pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintah, agar tercipta loyalitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam instansi pemerintah komitmen merupakan sikap yang menggambarkan kemauan dan kemampuan seseorang untuk menyelaraskan perilaku pribadi dalam mempengaruhi dan mengarahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi yang sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Menurut Soekidjan (2009) komitmen adalah kemampuan dan kemauan

untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara pengembangan tujuan dan memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. Menurut Sopiah (2008), ada tiga komponen komitmen :

1) *Affective commitment.*

Affective commitment merupakan proses perilaku dimana orang berfikir mengenai hubungan dengan organisasi dalam hal kesesuaian nilai-nilai individual akan secara langsung mempengaruhi keinginan individu untuk tetap bertahan dalam organisasi.

2) *Continuance commitment.*

Pengertian *continuance commitment* didasarkan pada keterkaitan dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam organisasi pemerintahan, sebagai bagian dimana karyawan secara psikologis terikat dengan organisasi berdasarkan biaya yang dikeluarkan (ekonomi, sosial, dan hubungan status) jika ia meninggalkan organisasi pemerintahan. Biaya yang dimaksud dimanifestasikan dalam dua hal yang berbeda. Pertama, masa kerja individu dalam organisasi pemerintahan yang mereka rasakan akan menumbuhkan loyalitas terutama dengan adanya program pensiun, senioritas, spesialisasi skill, afiliasi, dan ikatan keluarga yang akan merugikan mereka jika berpindah organisasi. Kedua, individu bisa merasakan mereka berfikir untuk tetap tinggal dalam organisasi karena tidak punya alternatif pekerjaan yang menjanjikan.

3) *Normative commitment.*

Adanya keinginan karyawan untuk tetap bersama organisasi berdasarkan kewajiban atas tugas yang diberikan kepada bawahannya. Bisa berasal dari budaya individual, etika kerja yang menyebabkan mereka wajib untuk tetap bertahan dalam organisasi. Dengan demikian rasa kesetiaan terhadap tugas yang mendasari komitmen normatif manajer publik mempengaruhi individu untuk tetap tinggal dalam organisasi tempat bekerjanya. Dengan demikian rasa kesetiaan terhadap tugas yang mendasari komitmen normatif mempengaruhi individu untuk tetap tinggal dalam organisasi.

Wibowo (2015) mengatakan komitmen organisasi berkaitan dengan

tingkat keterlibatan orang dengan organisasi dimana mereka bekerja dan tertarik untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut serta kesediaan orang untuk meningkatkan diri dan menunjukkan loyalitas pada organisasi karena merasakan dirinya terlibat dalam kegiatan organisasi. Carsten dan Spector dalam Adifitya (2014) mengatakan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka akan berdampak pada karyawan akan tetap tinggal dalam organisasi dan akan selalu meningkatkan kinerjanya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
1.	Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Bandung
2.	Indana Zulfah, Sri Wahyuni dan Arina Nurfaza (2017)	Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.	Sistem informasi akuntansi mempunyai hubungan yang kuat, memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya, dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

3.	Putri Syukria Lubis (2018)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan PD. Pasar Kota Medan.
4.	Arlia Sari Artana (2016)	Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
5.	Saifudin dan Rizki Nur Aprilia (2020)	Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang.	Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka teoritik merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka berpikir mengembangkan teori yang telah disusun dan menguraikan serta menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti. Kerangka teoritik menjelaskan hubungan antar variabel dan menjelaskan teori yang melandasi hubungan-hubungan tersebut

serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan-hubungan yang terjadi. Kerangka teoritik yang baik mengidentifikasi serta menentukan variabel-variabel yang relevan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan.

2.3.1 Hubungan antara Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Bodnar dan Hopwood (2000) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi, informasi itu dikomunikasikan kepada beragam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi memproses data yang diterima untuk menghasilkan dokumen, laporan dan informasi lainnya dalam satuan mata uang, ini bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui besarnya penyimpangan satu pos biaya dari anggaran yang telah ditetapkan dan akhirnya informasi itu digunakan untuk mengambil keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Zulfah, Sri Wahyuni dan Arina Nurfaza (2017), Kurniawati et al.(2020) dan Luky Trihandaru Hernanda dan Hari Setiyawati (2020) menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan sistem informasi akuntansi merupakan salah satu faktor yang penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya sistem informasi akuntansi maka akan meningkatkan dan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dikarenakan sistem informasi akuntansi dapat mempercepat dan mempermudah proses dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2.3.2 Hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Maksyur (2015) mengatakan bahwa Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang

berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian internal berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Saifudin & Aprilia(2020) dan Leiwakabessy(2018) menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan sistem pengendalian internal merupakan satu bagian yang penting atau berpengaruh dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas. Sistem pengendalian internal dapat digunakan untuk pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, serta menyediakan informasi keuangan yang andal, dan menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

2.3.3 Hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Rusvianto dkk, (2018) menyatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada didalamnya (Syarifudin, 2014). Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah informasi akuntansi keuangan yang berkualitas (Aprilia, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati et al. (2020), Leiwakabessy(2018), dan Pujanira (2017) menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam terbentuknya laporan keuangan yang berkualitas. Dari hasil penelitian-penelitian yang dilakukan juga menyatakan bahwa sumber daya manusia yang berkompeten dapat diketahui dari latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan pelatihan yang tepat sesuai dengan bidang tugas

yang dijalankan. Kualitas laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah akan semakin baik ketika sumber daya manusia yang menghasilkan laporan keuangan tersebut memiliki kompetensi yang memadai.

2.3.4 Hubungan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

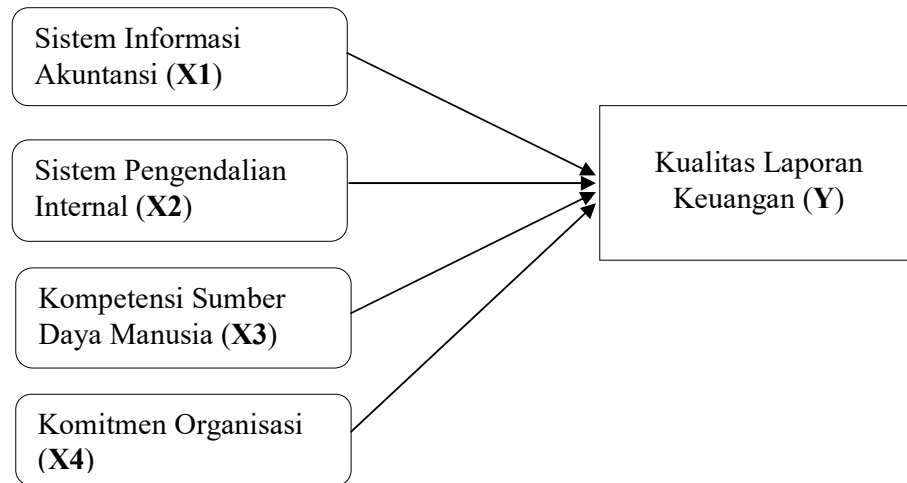
Menurut Lubis (2010) mengatakan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Sama halnya, menurut Wibowo (2015) mengatakan komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi dimana mereka bekerja dan tertarik untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut serta kesediaan orang untuk meningkatkan diri dan menunjukkan loyalitas pada organisasi karena merasakan dirinya terlibat dalam kegiatan organisasi. Dalam instansi pemerintah komitmen merupakan sikap yang menggambarkan kemauan dan kemampuan seseorang untuk menyelaraskan perilaku pribadi dalam mempengaruhi dan mengarahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi yang sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati et al. (2020) dan Maksyur (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi dalam mencapai suatu tujuan bersama maka hasil pekerjaan yang dilakukan akan semakin berkualitas. Membangun komitmen dalam organisasi diperlukan untuk mengembangkan dan memelihara informasi akuntansi adalah bagian integral dari pelayanan dan pengambilan keputusan. Dengan adanya komitmen organisasi maka setiap pekerja akan mempunyai tanggungjawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasinya.

2.4 Model Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya (Siyoto, 2015). Berdasarkan model penelitian di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- H2 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- H3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- H4 : Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer (Sekaran, 2006) adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti pada variabel minat untuk tujuan khusus penelitian.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden. Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Jambi.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Jambi yang berjumlah 87 orang.

3.2.2 Sampel

Erlina (2007) menyatakan bahwa sampel adalah suatu bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 87 orang.

Tabel 3.1

Sampel

No	Bidang	Jumlah Pegawai
1	Kepala BPKAD	1
2	Sekretaris	1
3	Umum dan Kepegawaian	10
4	Anggaran	5
5	Perbendaharaan dan Kas Daerah	13
6	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	8
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	7
8	Pegawai lainnya (tidak tetap)	42
TOTAL		87

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.

3.3 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Prosedur pengumpulan data dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan tanggungjawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan salah satu pegawai pada setiap bidang.

Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan variabel yang diukur. Pengukuran instrumen menggunakan skala likert, dimana berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap seseorang terhadap pernyataan itu. Adapun yang dipakai sebagai kuesioner data angket dengan menggunakan 5 (lima) pilihan yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Cukup Setuju (CS), Tidak Setuju (TS), dan

Sangat Tidak Setuju (STS). Setiap pilihan akan diberikan skor atau bobot nilai yang berbeda seperti pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skor/Bobot Penilaian Menggunakan Skala Likert

No	Keterangan	Skor/Bobot
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Cukup Setuju (CS)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.4 Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016) variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi terkait hal tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan skala likert dimana terdapat tingkatan-tingkatan poin pengukuran yaitu poin 1 sampai dengan 5 yang mengukur setiap item dalam jawaban atas pernyataan pada angket. Jawaban setiap bukti angket memiliki nilai, poin 1 jawaban dalam kategori Sangat Setuju, poin 2 Setuju, poin 3 Cukup Setuju, poin 4 Tidak Setuju, dan poin 5 Sangat Tidak Setuju.

Sekaran & Bougie (2016) menjelaskan bahwa masih terdapat perdebatan apakah skala likert termasuk skala ordinal atau interval. Menurut Sekaran & Bougie (2016) skala likert termasuk dalam skala semantik diferensial dan numerikal yang dapat juga dikelompokkan ke dalam skala interval.

Penelitian ini berjudul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi yang terdiri dari variabel yang meliputi:

Tabel 3.3
Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Sistem Informasi Akuntansi (X1)	Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Artana, 2016).	1. Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) 2. Perangkat lunak (<i>Software</i>) 3. <i>Brainware</i> 4. Prosedur 5. Database 6. Jaringan komputer dan telekomunikasi. (Artana, 2016).	Interval
2.	Sistem Pengendalian Internal (X2)	Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Internal. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).	Interval

3.	Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu di dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai suatu kinerja, sehingga menghasilkan keluaran-keluaran (output) serta hasil-hasil (outcomes) (Ihsanti, 2014).	1. Kompetensi di Bidang Keuangan. 2. Pendidikan dan Pelatihan. 3. Pengalaman di Bidang Keuangan. (Ihsanti, 2014).	Interval
4.	Komitmen Organisasi (X4)	Komitmen Organisasi merupakan tingkat sampai sejauh apa seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Lubis, 2010).	1. <i>Affective commitment</i> 2. <i>Continuance commitment</i> 3. <i>Normative commitment</i> . (Lubis, 2010).	Interval
5.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan Asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).	1. Relevan 2. Keandalan 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat Dipahami. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).	Interval

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Tarigan, 2011). Teknik analisis data adalah sebagai berikut:

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif lebih berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta panyajian hasil peringkasan tersebut (Santoso, 1999).

3.5.2 Uji Kualitas Data

3.5.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Kriteria pengujian validitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018):

1. Apabila $\text{sig.} < 0,05$ maka item pernyataan dikatakan valid.
2. Apabila $\text{sig.} > 0,05$ maka item pernyataan dikatakan tidak valid.

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula (Siregar, 2016). Teknik pengukuran reliabilitas menggunakan teknik *alpha cronbach* untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak, bila jawaban yang diberikan responden berbentuk skala. Kriteria pengujian reliabilitas adalah

1. Apabila cronbach's alpha. $> 0,7$ maka item pernyataan dikatakan reliabel.
2. Apabila cronbach's alpha. $< 0,7$ maka item pernyataan dikatakan tidak reliabel.

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linear berganda. Metode regresi linear berganda berguna bagi para pengguna alat untuk dapat

melihat variabel yang bersifat kausal (Teguh, 2014). Analisis regresi linear berganda adalah pengembangan analisis regresi sederhana terhadap aplikasi yang terdiri dari dua atau lebih variabel independen untuk menduga nilai variabel dependen. Analisis linear berganda dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas yaitu Sistem Informasi Akuntansi (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3), dan Komitmen Organisasi (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) pada penelitian ini digunakan model regresi linear berganda. Rumusnya adalah sebagai:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas laporan keuangan

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi sistem informasi akuntansi (X1)

β_2 = Koefisien regresi sistem pengendalian internal (X2)

β_3 = Koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia (X3)

β_4 = Koefisien regresi komitmen organisasi (X4)

X1 = Variabel sistem informasi akuntansi

X2 = Variabel sistem pengendalian internal

X3 = Variabel kompetensi sumber daya manusia

X4 = Variabel komitmen organisasi

E = *Error term*

3.5.4 Uji Hipotesis Penelitian

3.5.4.1 Uji F (*F test*)

Pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan apakah variabel bebas secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian :

1. Jika sig. > 0,05 ((α = 5%), berarti H0 diterima, dan Ha ditolak.
2. Jika sig. < 0,05 ((α = 5%), berarti H0 ditolak, dan Ha diterima.

3.5.4.2 Uji t (*t-test*)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan terhadap t hitung, kemudian membandingkan nilai t hitung dengan tabel. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Jika $\text{sig.} > 0,05$ ($(\alpha = 5\%)$), berarti H_0 diterima, dan H_a ditolak.
2. Jika $\text{sig.} < 0,05$ ($(\alpha = 5\%)$), berarti H_0 ditolak, dan H_a diterima.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari hasil kuadrat koefisien korelasi parsial. Dalam nilai koefisien determinasi (R^2) berada antara nol dan satu, semakin mendekati nilai 1 atau 100% maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Nilai yang mendekati satu variabel independen memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dalam sedangkan R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R^2) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambah satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak penelitian mengajukan nilai *adjusted R square* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Ghozali (2018), kriteria penafsiran korelasi adalah:

Tabel 3.4
Kriteria Penafsiran Indeks Korelasi

No	Indeks	Kolerasi Keeratan
1	00,0 – 0,02	Sangat Lemah
2	0,21 – 0,40	Lemah
3	0,41 – 0,70	Kuat
4	0,71 – 0,90	Sangat Kuat
5	0,91 – 0,99	Sangat Kuat Sekali
6	1	Sempurna

Sumber : Ghozali (2018)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tentang BPKAD Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 56 Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, BPKAD adalah badan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah, memiliki peran sesuai karakteristik yaitu lebih kepada bersifat administrasi penyusunan formulasi kebijakan, bimbingan/pembinaan dan koordinasi.

Dalam melaksanakan tugasnya BPKAD Kota Jambi memiliki maksud dan tujuan, yaitu:

1. Memberikan motivasi kepada pimpinan instansi dan / atau penyelenggara pelayanan publik untuk secara terus-menerus meningkatkan kinerja pelayanannya.
2. Memberikan gambaran bagi masyarakat tentang jenis-jenis pelayanan yang ada di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Jambi.
3. Mengajak masyarakat untuk bersama Pemerintah Kota Jambi, menyemangati, mengawal, dan mengawasi upaya peningkatan pelayanan publik, dalam rangka pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dasar hukum yg digunakan pada BPKAD Kota Jambi dalam melaksanakan tugasnya antara lain:

1. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 2).
2. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 56 Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.

4.1.2 Visi dan Misi BPKAD Kota Jambi

1. Visi BPKAD Kota Jambi
Menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima.
2. Misi BPKAD Kota Jambi
Penguatan birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis Teknologi Informasi.

4.1.3 Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Jambi

A. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, BPKAD mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan dan penyusunan regulasi dan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 3) Pemberian dukungan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) Penyusunan pedoman, penataan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 5) Perumusan dan penyusun pendapatan serta koordinator pendapatan daerah;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

- a. Kedudukan Sekretariat sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- b. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- c. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi :
 - a. urusan umum dan kepegawaian;
 - b. urusan program dan pelaporan;
 - c. urusan keuangan; dan
 - d. tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat;

- b. koordinasi penyusunan perencanaan program kerja dengan bidang-bidang;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian perangkat daerah;
- d. penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- e. penyusunan administrasi keuangan perangkat daerah;
- f. pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan serta peningkatan sarana dan prasarana;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas kesekretariatan dan bidang-bidang;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan, administrasi perjalanan dinas badan perjalanan dinas badan serta administrasi dan surat menyurat kendaraan badan;
- c. menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan dan instruksi kepala badan serta menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan walikota yang berkaitan dengan melaksanakan tugas badan;
- d. melaksanakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana, mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dan penerimaan tamu

serta melaksanakan kebersihan, keindahan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan kantor;

- e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan dan menghimpun standar operasional prosedur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi;
- f. menyiapkan dan memproses usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa dan menyiapkan dan memproses permohonan izin dan cuti, tugas belajar, perpindahan (mutasi), perkawinan dan perceraian;
- g. mengusulkan penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan (Askes) dan mengusulkan peserta pendidikan dan pelatihan serta peserta ujian dinas pegawai;
- h. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai, menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) dan menghimpun sasaran kerja pegawai (SKP) serta melaporkan LHKPN dan LHKASN bagi ASN BPKAD;
- i. membuat standar operasional prosedur subbagian umum dan kepegawaian;
- j. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

D. Bidang Anggaran

- 1) Bidang Anggaran berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- 2) Bidang Anggaran dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Badan melalui sekretaris.
- 3) Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas bidang anggaran yang meliputi :
 - a. urusan anggaran pendapatan;

- b. urusan anggaran belanja;
 - c. urusan anggaran pembiayaan; dan
 - d. serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4) Untuk melaksanakan tugas bidang anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan rencana program kerja dan kegiatan Bidang Anggaran;
 - b. perumusan Standar Operasional Prosedur Anggaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan merumuskan perencanaan Anggaran;
 - d. perumusan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran;
 - e. perumusan KUA dan PPAS serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - f. perumusan Anggaran Kas;
 - g. perumusan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD;
 - h. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Anggaran; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Sub Bidang Anggaran Pendapatan

Sub Bidang Anggaran Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan urusan anggaran pendapatan, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
- c. Melakukan koordinasi dan menyusun perencanaan Anggaran Pendapatan;

- d. Menyusun KUA & PPAS dan perubahan KUA dan perubahan PPAS terkait kebijakan pendapatan;
- e. Menyusun data tentang Pendapatan terkait kebijakan pendapatan;
- f. Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD yang terkait dengan Pendapatan;
- g. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Sub Bidang Anggaran Pendapatan;
- h. Menyusun laporan bulanan dan tahunan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Sub Bidang Anggaran Belanja

Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan urusan anggaran belanja, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Anggaran Belanja;
- b. Menyusun Standar Operasional Prosedur Sub Bidang Anggaran Belanja;
- c. Melakukan koordinasi dan menyusun perencanaan Anggaran Belanja;
- d. Menyusun KUA dan PPAS dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS terkait kebijakan belanja;
- e. Menyusun dan memverifikasi RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD;
- f. Menyusun Anggaran Kas;
- g. Menyusun dan memverifikasi DPA SKPD dan Perubahan DPA SKPD;
- h. Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD yang terkait dengan Belanja;
- i. Menyusun pergeseran Anggaran Belanja;

- j. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Sub Bidang Anggaran Belanja;
- k. Menyusun laporan bulanan dan tahunan; dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

- 1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- 2) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui Sekretaris.
- 3) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang perbendaharaan dan kas daerah yang meliputi:
 - a. urusan pengelolaan kas;
 - b. urusan pelayanan perbendaharaan;
 - c. urusan pengelolaan gaji dan tunjangan; dan
 - d. serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4) Untuk melaksanakan tugasnya bidang perbendaharaan dan kas daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - b. koordinasi pelaksanaan penatusahaan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. koordinasi pelaksanaan perumusan peraturan Walikota tentang pelaksanaan APBD;
 - d. koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan gaji;

- e. koordinasi pelaksanaan program kegiatan peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan peningkatan pelayanan dan fasilitas penerimaan daerah;
- f. koordinasi pelaksanaan program kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan program pengendalian, evaluasi, monitoring dan pelaporan dana transfer;
- g. koordinasi pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan, fasilitas pencairan dana OPD se Kota Jambi;
- h. perumusan kebijakan petunjuk teknis bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- i. koordinasi pelaksanaan pengadministrasi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran setara kas, atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- j. koordinasi pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. penyusunan laporan kerja dan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah melaksanakan kebijakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang pengelolaan kas dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bidang pengelolaan kas;
- b. melaksanakan penatausahaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
- c. melaksanakan pelayanan proses pencairan dan OPD atau pihak ketiga;
- d. melaksanakan administrasi secara tertib atas penerimaan, pengeluaran daerah kedalam buku kas, koreksi dan validasi rekapitulasi penerimaan harian dan penerimaan bulanan;
- e. melaksanakan Pengelolaan Dana Transfer dari Pusat, Provinsi dan lainnya;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan dengan OPD terkait rekonsiliasi laporan penerimaan bulanan seluruh OPD Pengelola PAD;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dengan Subbid lainnya di BPKAD;
- i. menyusun laporan kerja dan kegiatan sub bidang pengelolaan kas;
- j. membuat standar operasional sub bidang pengelolaan kas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

I. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan

Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala bidang perbendaharaan dan kas daerah melakukan pengendalian pengeluaran serta menerbitkan dan menyusun register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pelayanan perbendaharaan di lingkup pemerintah Kota Jambi dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bidang pelayanan perbendaharaan;
- b. mengelola dan mengadministrasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sub bidang pelayanan perbendaharaan;
- c. menyusun dan membuat buku petunjuk teknis tentang pedoman pelaksanaan penatausahaan belanja se-Kota Jambi;
- d. meneliti kelengkapan dokumen dan ketersediaan anggaran kas OPD se- Kota Jambi untuk proses penerbitan SP2D;
- e. menerbitkan, meneliti dan memaraf Draft SP2D dan pengesahan keuangan lainnya;
- f. melaksanakan koordinasi dan monitoring pelaksanaan penelitian dokumen SPP dan SPM;
- g. melakukan pembinaan terkait dengan pengelolaan keuangan bagi bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu OPD se-Kota Jambi;

- h. melaksanakan koordinasi dengan sub bidang lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. menyusun laporan kerja dan kegiatan sub bidang pelayanan perbendaharaan;
- j. membuat standar operasional sub bidang pelayanan perbendaharaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

J. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- 1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- 2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui Sekretaris.
- 3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang meliputi :
 - a. urusan akuntansi;
 - b. urusan pelaporan keuangan daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4) Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi sistem akuntansi pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penatausahaan akuntansi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. pelaksanaan koordinasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi penyusunan tanggapan/tindaklanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan kerja dan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

K. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja

Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dalam melaksanakan urusan Akuntansi Pendapatan dan Belanja, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang akuntansi pendapatan dan belanja;
- b. menyusun rancangan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. melaksanakan pembinaan dan penatausahaan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD, SKPKD dan BLUD dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah;
- e. membuat standar operasional prosedur sub bidang akuntansi pendapatan dan belanja;
- f. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

L. Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah

Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dalam melaksanakan urusan pelaporan lingkup pemerintah kota, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bidang pelaporan keuangan daerah
- b. menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaporan;
- c. melaksanakan konsolidasi laporan keuangan SKPD, SKPKD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. menyiapkan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. menyusun konsep tanggapan/tindaklanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. membuat standar operasional prosedur sub bidang pelaporan keuangan daerah;
- g. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

M. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya.
- 2) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris.
- 3) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu kepada badan dalam melaksanakan tugas dibidang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi :
 - a. urusan penatausahaan, konsolidasi dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;

- b. urusan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan barang milik daerah; dan
 - c. urusan perencanaan kebutuhan dan pengamanan barang milik daerah; dan
 - d. serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 4) Untuk melaksanakan tugas bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan barang;
 - b. penyusunan administrasi pengelolaan dan penyelenggaraan barang milik daerah;
 - c. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - d. pelaksanaan pengaturan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. pelaksanaan pengaturan perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi pengelolaan barang milik daerah;
 - g. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen pengelolaan barang milik daerah;
 - i. penyusunan dan penerbitan satandar satuan harga;
 - j. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan barang milik daerah.
 - k. pembuatan laporan bulanan dan tahunan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- N. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Kepala Sub Bidang Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan urusan penatausahaan dan pembinaan dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kerja sub bidang penatausahaan barang milik daerah;
- b. menyiapkan bahan dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis tentang penatausahaan, konsolidasi dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- c. mengkoordinir pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- d. melaksanakan konsolidasi penyusunan LBMD dari SKPD;
- e. menyusun kartu inventaris barang (KIB) daftar barang milik daerah (DBMD);
- f. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen pengelolaan barang milik daerah;
- h. melakukan inventarisasi barang milik daerah pada setiap OPD secara berkala;
- i. melaksanakan kajian yang berkaitan dengan penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah;
- j. membuat standar operasional prosedur sub bidang penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah;
- k. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

O. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik

Daerah dalam melaksanakan urusan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- b. menyiapkan bahan dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis tentang penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
- c. menginventarisir data penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
- d. mengkoordinir pelaksanaan penilaian terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- e. mengkoordinir pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- f. melakukan dan mengkoordinir pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtanganan dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah;
- g. melaksanakan kajian yang berkaitan dengan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. membuat standar operasional prosedur sub bidang penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. membuat laporan bulanan dan tahunan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

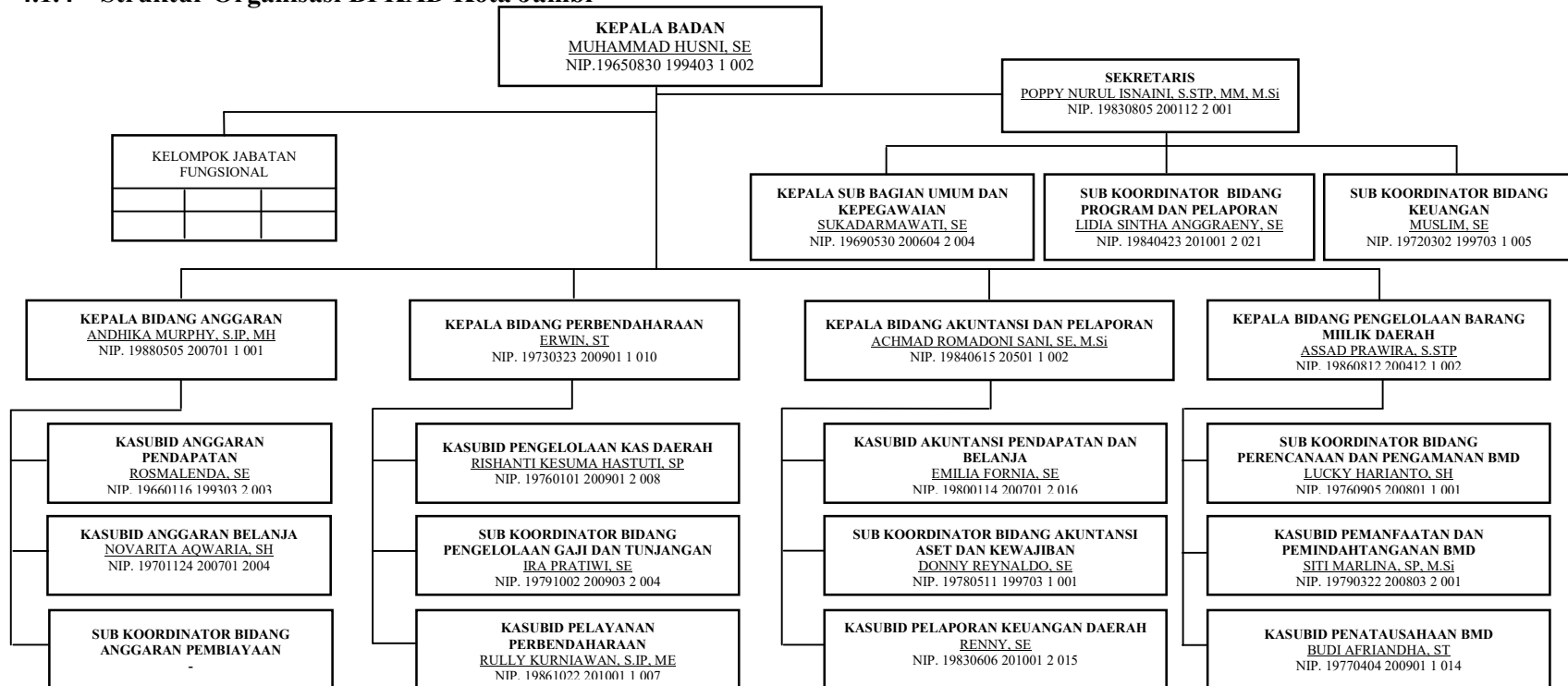
P. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- 4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
 - a. Pejabat fungsional yang menjadi Sub koordinator merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan atau bukan hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
 - b. Sub koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
 - c. Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

4.1.4 Struktur Organisasi BPKAD Kota Jambi



Gambar 4.1

Struktur Organisasi BPKAD Kota Jambi

Struktur organisasi BPKAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 56 Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi, memiliki formasi sebagai berikut:

1. **Kepala Badan;**
2. **Sekretariat**, terdiri dari :
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Sub bagian program dan pelaporan;
 - c. Sub bagian keuangan.
3. **Bidang Anggaran**, terdiri dari :
 - a. Sub bidang anggaran pendapatan;
 - b. Sub bidang anggaran belanja;
 - c. Sub bidang anggaran pembiayaan.
4. **Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**, terdiri dari :
 - a. Sub bidang pengelolaan kas daerah;
 - b. Sub bidang pengelolaan gaji dan tunjangan;
 - c. Sub bidang pelayanan perbendaharaan
5. **Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**, terdiri dari :
 - a. Sub bidang akuntansi pendapatan dan belanja;
 - b. Sub bidang akuntansi aset dan kewajiban;
 - c. Sub bidang pelaporan keuangan daerah.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :

- a. Sub bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- b. Sub bidang Pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- c. Sub bidang perencanaan kebutuhan dan pengamanan barang milik daerah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

4.2 Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian, kuesioner yang dibagikan sejumlah 87 lembar eksemplar atau 100% dan kembali dalam jumlah 62 lembar atau 71%. Namun, terdapat 54 lembar kuesioner atau 62% yang dapat diolah karena kuesioner terisi dengan lengkap dan terdapat 8 lembar kuesioner atau 9% yang dianggap tidak dapat diolah dikarenakan responden tidak mengisi identitas responden dan beberapa pertanyaan yang tidak diisi oleh responden, oleh sebab itu kuesioner tidak dapat diolah lebih lanjut. Adapun gambaran karakteristik data kuesioner dan deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	87	100%
2	Kuesioner yang kembali dan dapat diolah	54	62%
3	Kuesioner yang tidak kembali	25	29%
4	Kuesioner yang tidak dapat diolah	8	9%

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dari 87 kuesioner yang disebar hanya 54 lembar kuesioner atau 62% yang dapat diolah, sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 8 lembar atau 9%, serta kuesioner yang tidak kembali sebanyak 25 lembar atau 29%.

4.2.1 Demografi Responden

a. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BPKAD Kota Jambi. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 54 lembar. Deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2. di bawah ini:

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	25	46.3	46.3	46.3
	Perempuan	29	53.7	53.7	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Tabel 4.2. di atas menjelaskan bahwa dari 54 responden sebanyak 25 orang (46.3%) berjenis kelamin laki-laki, dan 29 orang (53.7%) berjenis kelamin perempuan. Tabel 4.2. di atas menjelaskan bahwa SDM yang berada di BPKAD Kota Jambi didominasi oleh perempuan.

b. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

Responden dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BPKAD Kota Jambi. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 54 lembar. Deskriptif responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.3. di bawah ini:

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-29 Tahun	21	38.9	38.9	38.9
	30-39 Tahun	13	24.1	24.1	63.0
	40-49 Tahun	10	18.5	18.5	81.5
	>50 Tahun	6	11.1	11.1	92.6
	-	4	7.4	7.4	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Tabel 4.3 di atas menjelaskan bahwa dari 54 responden sebanyak 21 orang (38.9%) yang berusia 20-29 tahun, 13 orang (24.1%) berusia 30-39 tahun, 10 orang (18.5%) yang berusia 40-49 tahun, 6 orang (11.1%) yang berusia >50 tahun, dan terdapat 4 orang (7.4%) yang tidak mengisi data usia responden.

c. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Responden dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BPKAD Kota Jambi. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 54 lembar. Deskriptif responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.4. di bawah ini:

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/SEDERAJAT	9	16.7	16.7	16.7
	DIPLOMA	6	11.1	11.1	27.8
	S1	33	61.1	61.1	88.9
	S2	5	9.3	9.3	98.1
	-	1	1.9	1.9	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Tabel 4.4 di atas menjelaskan bahwa dari 54 responden sebanyak 9 orang (16.7%) yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SEDERAJAT, 6 orang (11.1%) memiliki pendidikan terakhir Diploma, 33 orang (61.1%) memiliki pendidikan terakhir S1, 5 orang (9.3%) memiliki pendidikan terakhir S2, dan terdapat 1 orang (1.9%) yang tidak mencantumkan pendidikan terakhir pada data responden.

d. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pangkat/Golongan

Responden dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BPKAD Kota Jambi. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 54 lembar. Deskriptif responden berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pangkat/Golongan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pembina (IV/a)	1	1.9	1.9	1.9
	Penata (III/c)	1	1.9	1.9	3.7
	Penata Muda (III/a)	4	7.4	7.4	11.1
	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	4	7.4	7.4	18.5
	Penata Tk. 1 (III/d)	11	20.4	20.4	38.9
	Pengatur (II/c)	2	3.7	3.7	42.6
	Pengatur Tk. 1 (II/d)	1	1.9	1.9	44.4
	Pengatur Tk. 1 (III/a)	1	1.9	1.9	46.3
	Tenaga Kerja Kontrak	29	53.7	53.7	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Tabel 4.5 di atas menjelaskan bahwa dari 54 responden sebanyak 1 orang (1.9%) yang memiliki pangkat/golongan Pembina (IV/a), 1 orang (1.9%) yang memiliki pangkat/golongan Penata (III/c), 4 orang (7.4%) yang memiliki pangkat/golongan Penata Muda (III/a), 4 orang (7.4%) yang memiliki pangkat/golongan Penata Muda Tk. 1 (III/b), 11 orang (20.4%) yang memiliki

pangkat/golongan Penata Tk.1 (III/d), 2 orang (3.7%) yang memiliki pangkat/golongan Pengatur (II/c), 1 orang (1.9%) yang memiliki pangkat/golongan Pengatur Tk. 1 (II/d), 1 orang (1.9%) yang memiliki pangkat/golongan Pengatur Tk. 1(III/a), dan 29 orang (53.7%) yang memiliki pangkat/golongan Tenaga Kerja Kontrak.

e. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jabatan

Responden dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BPKAD Kota Jambi. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 54 lembar. Deskriptif responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jabatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	1.9	1.9	1.9
	Analisis Bimbingan Akuntansi	1	1.9	1.9	3.7
	Analisis Perencanaan	1	1.9	1.9	5.6
	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	1	1.9	1.9	7.4
	Bendahara Pembantu	1	1.9	1.9	9.3
	Bendahara Penerima	1	1.9	1.9	11.1
	Fungsional Arsiparis	2	3.7	3.7	14.8
	Fungsional Pelaksana	1	1.9	1.9	16.7
	Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1.9	1.9	18.5
	Kasubag. Keuangan (AKPD)	1	1.9	1.9	20.4
	Kasubag. Umum & Kepegawaian	1	1.9	1.9	22.2
	Kasubbid. Pelayanan Perbendaharaan	1	1.9	1.9	24.1
	Kasubbid. Anggaran Pendapatan	1	1.9	1.9	25.9
	Kasubbid. Pemanfaatan & Pemindahtanganan Barang Milik	1	1.9	1.9	27.8
	Kasubbid. Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	1.9	1.9	29.6

	Pengadministrasi Keuangan	1	1.9	1.9	31.5
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	2	3.7	3.7	35.2
	Pengelola Barang Inventaris	1	1.9	1.9	37.0
	Pengelola Barang Milik Negara	1	1.9	1.9	38.9
	Pengolah Data dan Informasi	2	3.7	3.7	42.6
	Staf BPKAD	1	1.9	1.9	44.4
	Subkoordinator Bid. Program & Pelaporan	1	1.9	1.9	46.3
	Tkk BPKAD	29	53.7	53.7	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Tabel 4.6 di atas menjelaskan bahwa dari 54 responden terdapat 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Analisis Bimbingan Akuntansi, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Analisis Perencanaan, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Analisis Sistem Akuntansi Instansi, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Bendahara Pembantu, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Bendahara Penerima, 2 orang (3.7%) yang memiliki jabatan Fungsional Arsiparis, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Fungsional Pelaksana, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Kassubag Keu (AKPD), 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Kasubbag. Umum & Kepegawaian, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Kasubbid. Anggaran Pendapatan, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Kasubbid. Pemanfaatan & Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Kasubbid. Penatausahaan Barang Milik Daerah, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Pengadministrasi Keuangan, 2 orang (3.7%) yang memiliki jabatan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Pengelola Barang Inventaris, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Pengelola Barang Milik Negara, 2 orang (3.7%) yang memiliki jabatan Pengolah Data dan Informasi, 1 orang (1.9%)

yang memiliki jabatan Staf BPKAD, 1 orang (1.9%) yang memiliki jabatan Subkoordinator Bid. Program & Pelaporan, dan 29 orang (53.7) yang memiliki jabatan Tenaga Kerja Kontrak (Tkk) BPKAD.

f. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Bekerja

Responden dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan BPKAD Kota Jambi. Kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 54 lembar. Deskriptif responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Lama Bekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 1 Tahun	6	11.1	11.1	11.1
	1-3 Tahun	11	20.4	20.4	31.5
	> 3 Tahun	37	68.5	68.5	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Tabel 4.7 di atas menjelaskan bahwa dari 54 responden, sebanyak 6 orang (11.1%) telah bekerja selama kurang dari 1 tahun, 11 orang (20.4%) telah bekerja selama 1-3 tahun, dan 37 orang (68.5%) telah bekerja selama lebih dari 3 tahun.

4.2.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif statistik dengan menggunakan bantuan program *SPSS* versi 25 disajikan pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Analisis Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	54	3.0	5.0	4.380	.5242
X2	54	2.4	5.0	4.351	.6226
X3	54	2.3	5.0	4.235	.7192
X4	54	2.6	5.0	4.270	.5738
Y	54	3.0	5.0	4.406	.6124
Valid N (listwise)	54				

Sumber: diolah oleh Peneliti

Keterangan:

X₁ : Sistem Informasi Akuntansi

X₂ : Sistem Pengendalian Internal

X₃ : Kompetensi Sumber Daya Manusia

X₄ : Komitmen Organisasi

Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah sebesar 54 data. Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X1) memiliki nilai minimum 3,0 dan nilai maksimum 5,0. Nilai rata-rata Sistem Informasi Akuntansi (X1) 4,38 dengan nilai standar deviasi 0,5242. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) mempunyai nilai minimum sebesar 2,4 dan nilai maksimum sebesar 5,0. Nilai rata-rata Sistem Pengendalian Internal (X2) adalah sebesar 4,351 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,6226.

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) mempunyai nilai minimum 2,3 dan nilai maksimum 5,0. Rata-rata Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) adalah sebesar 4,235 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,7192. Variabel Komitmen Organisasi (X4) mempunyai nilai minimum 2,6 dan nilai maksimum 5,0. Rata-rata Komitmen Organisasi (X4) adalah sebesar 4,27 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,5738. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) mempunyai nilai minimum 3,0 dan nilai maksimum 5,0. Rata-rata Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah sebesar 4,406 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,6124.

4.2.3. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai signifikansi. Jika $\text{sig.} < 0,05$ maka disimpulkan instrumen tersebut memenuhi kriteria validitas sehingga item tersebut layak (valid).

1. Hasil Uji Validitas Sistem Informasi Akuntansi (X_1)

Tabel 4.9 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap indikator Sistem Informasi Akuntansi (X_1).

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Indikator Sistem Informasi Akuntansi (X_1)

Indikator	Sig.	$\alpha = 5\%$	Keterangan
X1.1.	0,000	0,05	Valid
X1.2	0,000		Valid
X1.3	0,000		Valid
X1.4	0,000		Valid
X1.5	0,000		Valid
X1.6	0,000		Valid
X1.7	0,000		Valid
X1.8	0,000		Valid

Sumber: diolah oleh Peneliti

Hasil pengujian pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa setiap indikator menghasilkan nilai signifikansi ($\text{sig.} < 0,05$ ($\alpha = 5\%$)) dengan kata lain instrumen penelitian yang berjumlah delapan pernyataan dalam penelitian telah mampu mengukur variabel Sistem Informasi Akuntansi (X_1).

2. Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal (X_2)

Tabel 4.10 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap indikator Sistem Pengendalian Internal (X_2)

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Indikator Sistem Pengendalian Internal (X₂)

Indikator	Sig.	$\alpha = 5\%$	Keterangan
X2.1	0,000	0,05	Valid
X2.2	0,000		Valid
X2.3	0,000		Valid
X2.4	0,000		Valid
X2.5	0,000		Valid
X2.6	0,000		Valid
X2.7	0,000		Valid
X2.8	0,000		Valid
X2.9	0,000		Valid
X2.10	0,000		Valid
X2.11	0,000		Valid
X2.12	0,000		Valid
X2.13	0,000		Valid
X2.14	0,000		Valid

Sumber: diolah oleh Peneliti

Hasil pengujian pada tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa setiap indikator menghasilkan nilai signifikansi (sig) < 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan kata lain instrumen penelitian yang berjumlah empat belas pernyataan dalam penelitian telah mampu mengukur variabel sistem pengendalian internal.

3. Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₃)

Tabel 4.11 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₃).

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₃)

Indikator	Sig.	$\alpha = 5\%$	Keterangan
X3.1	0,000	0,05	Valid
X3.2	0,000		Valid
X3.3	0,000		Valid
X3.4	0,000		Valid
X3.5	0,000		Valid
X3.6	0,000		Valid

Sumber: diolah oleh Peneliti

Hasil pengujian pada tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa setiap indikator menghasilkan nilai signifikansi (sig) < 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan kata lain instrumen penelitian yang berjumlah enam pernyataan dalam penelitian telah

mampu mengukur variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia.

4. Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi (X₄)

Tabel 4.6 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap indikator Komitmen Organisasi (X₄).

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Indikator Komitmen Organisasi (X₄)

Indikator	Sig.	$\alpha = 5\%$	Keterangan
X4.1	0,000	0,05	Valid
X4.2	0,000		Valid
X4.3	0,000		Valid
X4.4	0,000		Valid
X4.5	0,000		Valid
X4.6	0,000		Valid
X4.7	0,000		Valid
X4.8	0,000		Valid
X4.9	0,000		Valid
X4.10	0,000		Valid

Sumber: diolah oleh Peneliti

Hasil pengujian pada tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa setiap indikator menghasilkan nilai signifikansi (sig) < 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan kata lain instrumen penelitian yang berjumlah sepuluh pernyataan dalam penelitian telah mampu mengukur variabel Komitmen Organisasi.

5. Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Tabel 4.13 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Indikator	Sig.	$\alpha = 5\%$	Keterangan
Y1.1	0,000	0,05	Valid
Y1.2	0,000		Valid
Y1.3	0,000		Valid
Y1.4	0,000		Valid
Y1.5	0,000		Valid
Y1.6	0,000		Valid

Y1.7	0,000		Valid
Y1.8	0,000		Valid
Y1.9	0,000		Valid
Y1.10	0,000		Valid
Y1.11	0,000		Valid
Y1.12	0,000		Valid
Y1.13	0,000		Valid
Y1.14	0,000		Valid
Y1.15	0,000		Valid

Sumber: diolah oleh Peneliti

Hasil pengujian pada tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa setiap indikator menghasilkan nilai signifikansi ($\text{sig} < 0,05$ ($\alpha = 5\%$)) dengan kata lain instrumen penelitian yang berjumlah lima belas pernyataan dalam penelitian telah mampu mengukur variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2.4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan sebagai alat ukur suatu objek atau responden (Indriantoro & Supomo, 2018). Hasil uji reliabilitas mencerminkan dapat dipercaya atau tidaknya suatu instrumen penelitian berdasarkan tingkat kemantapan dan ketetapan suatu alat ukur dalam pengertian bahwa hasil pengukuran yang didapatkan merupakan ukuran yang benar dari sesuatu yang diukur, dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah *one shot*, artinya dilakukan satu kali pengukuran saja dan dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antarjawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Ghozali, 2018).

Tabel 4.14 berikut ini menyajikan hasil reliabilitas variabel – variabel penelitian.

Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	N of Items
Sistem Informasi Akuntansi (X ₁)	0,892	8
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	0,964	14
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₃)	0,946	6
Komitmen Organisasi (X ₄)	0,911	10
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,980	15

Sumber: diolah oleh Peneliti

Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner pada tabel 4.14 di atas menghasilkan angka *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,7. Berdasarkan hasil ini dapat dinyatakan bahwa semua variabel menunjukkan kuatnya reliabilitas dan memenuhi persyaratan untuk dipakai dalam penelitian.

4.2.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini, dengan menggunakan program SPSS versi 25.0, dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut:

Tabel 4.15
Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi
Konstanta	0,283
Sistem Informasi Akuntansi (X ₁)	0,311
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	0,789
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₃)	0,057
Komitmen Organisasi (X ₄)	-0,215

Sumber: diolah oleh Peneliti

Berdasarkan nilai – nilai yang ditunjukkan pada tabel 4.15 di atas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KLKPD = 0,283 + 0,311SIA + 0,789SPI + 0,057KSDM - 0,215KO + e$$

Keterangan:

KLKPD : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

α : Konstanta

$\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4$: Koefisien regresi variabel independen

SIA : Sistem Informasi Akuntansi

SPI : Sistem Pengendalian Internal

KSDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia

KO : Komitmen Organisasi

Persamaan regresi linear berganda tabel 4.15 diatas, menunjukkan bahwa variabel independen (Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Komitmen Organisasi) memiliki arah positif terhadap variabel dependen (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), kecuali komitmen organisasi. Hasil persamaan regresi berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 0,283. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa ada pengaruh dari keempat variabel independen dan faktor lain, maka nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara konstan akan bernilai sebesar 0,283.
2. Nilai koefisien regresi variabel sistem informasi akuntansi (X_1) bernilai positif yaitu sebesar 0,311. Hal ini berarti apabila nilai sistem informasi akuntansi meningkat, maka akan meningkatkan nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X_2) bernilai positif yaitu sebesar 0,789. Hal ini berarti apabila nilai sistem pengendalian internal meningkat, maka akan meningkatkan nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Nilai koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia (X_3) bernilai positif yaitu sebesar 0,057. Hal ini berarti apabila nilai kompetensi sumber daya manusia meningkat, maka akan meningkatkan nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Nilai koefisien regresi variabel komitmen organisasi (X_4) bernilai negatif yaitu sebesar -0,215. Hal ini berarti apabila nilai komitmen organisasi meningkat, maka akan menurunkan nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2.6. Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Uji F seringkali juga dinamakan dengan *analysis of variance*. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel penjelas yang digunakan dalam model, secara bersama-sama mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel yang ingin dijelaskan dengan menggunakan uji F test. Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut hasil regresi disajikan pada tabel 4.16 di bawah ini.

Tabel 4.16
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.725	4	4.181	64.985	.000 ^b
	Residual	3.153	49	.064		
	Total	19.878	53			

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Sumber: diolah oleh Peneliti

Berdasarkan hasil uji ANOVA (*Analysis of Variance*) diperoleh nilai F-hitung sebesar 64,985 dan tingkat signifikan lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% dimana $\text{sig. } 0,000 < 0,05$. Dengan demikian hasil ini

memberikan makna bahwa sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Uji t

Uji t bertujuan untuk melihat apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan (Ghozali, 2018). Perhitungan dengan menggunakan *SPSS versi 25* yang disajikan dalam tabel 4.17 sebagai berikut ini.

Tabel 4.17
Hasil Uji t

Variabel Penelitian	Signifikansi
Sistem Informasi Akuntansi (X_1)	0,010
Sistem Pengendalian Internal (X_2)	0,000
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_3)	0,578
Komitmen Organisasi (X_4)	0,083

Sumber: diolah oleh Peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji t pada tabel 4.17 di atas dari empat variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi terlihat bahwa:

1. Variabel sistem informasi akuntansi (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Nilai ini memberikan makna bahwa variabel sistem informasi akuntansi memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti hipotesis pertama yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kota Jambi diterima.
2. Variabel sistem pengendalian internal (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Nilai ini memberikan makna bahwa variabel sistem pengendalian internal memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kota Jambi diterima.

3. Variabel kompetensi sumber daya manusia (X_3) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,578 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Nilai ini memberikan makna bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kota Jambi ditolak.
4. Variabel komitmen organisasi (X_4) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,083 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Nilai ini memberikan makna bahwa variabel komitmen organisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti hipotesis keempat yang menyatakan bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kota Jambi ditolak.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi/ R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen (Ghozali, 2018). Uji determinasi dihasilkan nilai *adjusted R Square* sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 4.18 sebagai berikut:

Tabel 4.18
Hasil Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.917 ^a	.841	.828	.2537

a. Predictors: (Constant), X_4 , X_1 , X_3 , X_2

b. Dependent Variable: Y_1

Sumber: diolah oleh Peneliti

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat dapat diketahui melalui nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* (R^2) dipilihnya *Adjusted R Square* agar tidak bias terhadap jumlah variabel independen yang dimaksudkan

kedalam model, karena tidak seperti R^2 nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model, sedangkan R^2 setiap tambahan satu variabel independen, maka *R Square* pasti akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Berdasarkan hasil uji determinasi pada tabel 4.18 diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* sebesar 0,828 yang mengandung arti bahwa 82,8% besarnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi, sedangkan sisanya 17,2% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti teknologi informasi (Saifudin & Aprilia, 2020), pelatihan dan pengawasan (Purboraras, 2020).

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan, diketahui bahwa uji F dalam penelitian ini menunjukkan hasil uji ANOVA (*Analysis of Variance*) dengan nilai F-hitung sebesar 64,985 dan tingkat signifikan lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% dimana $\text{sig. } 0,000 < 0,05$. Dengan demikian hasil ini memberikan makna bahwa sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian – penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Leiwakabessy (2018); Purboraras (2020); Saifudin & Aprilia (2020). Organisasi yang memiliki sistem informasi akuntansi yang baik dengan sistem pengendalian internal yang ketat, serta didukung oleh adanya sumber daya manusia yang kompeten yang memiliki komitmen yang tinggi dalam organisasi akan menghasilkan suatu mekanisme yang baik dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Adapun pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dijelaskan sebagai berikut.

4.3.1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel sistem informasi akuntansi (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kota Jambi. Sesuai dengan hasil pengumpulan kuesioner menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas, setiap bagian memiliki jumlah perangkat-perangkat yang cukup. Selain itu sebagian besar responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki penguasaan serta kemampuan dasar yang cukup baik dalam pengaplikasian teknologi komputerisasi sehingga sangat menguntungkan dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kota Jambi mempunyai arti bahwa semakin tinggi sistem informasi akuntansi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pada BPKAD Kota Jambi sudah dimanfaatkan secara maksimal.

Data penelitian yang dikumpulkan dari 54 responden menunjukkan informasi bahwa sebanyak 50 responden setuju dan sangat setuju pada pernyataan “Pemanfaatan dan penguasaan terhadap teknologi komputerisasi adalah kemampuan dasar bagi tim penyusun laporan” sedangkan sisanya 4 responden tidak setuju. Hal ini menunjukkan informasi bahwa sistem informasi akuntansi yang baik memerlukan peran dari teknologi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Terdapat sebanyak 48 orang responden yang setuju dan sangat setuju atas item pernyataan $X_{1.3}$ yang menyatakan bahwa “Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan”. Sistem informasi akuntansi yang baik tentu saja harus dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu karena informasi yang penting sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan yang penting pula.

Terdapat sebanyak 50 responden yang setuju dan sangat setuju atas item pernyataan $X_{1.4}$ yang menyatakan bahwa “Pemanfaatan teknologi informasi membuka peluang untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi

keuangan secara cepat dan akurat”. Sistem informasi akuntansi dapat memberikan kemudahan serta keakuratan data yang dihasilkan sehingga dapat mempermudah dalam menghasilkan laporan keuangan. Setiap organisasi tentu perlu memiliki laporan keuangan salah satunya untuk menilai kinerja organisasi dari sisi keuangan. Guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, tentu diperlukan suatu sistem pengolahan informasi yang mampu mempermudah pengolahan data menjadi informasi yang dapat akurat dan tepat waktu untuk itu sistem informasi akuntansi sangat diperlukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hernanda & Setiyawati (2020), yang menemukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Implementasi SIA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Implementasi sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah akan dapat memenuhi kebutuhan dalam penyusunan sebuah laporan keuangan secara efektif dan efisien. Dukungan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah akan menghasilkan informasi yang baik sehingga kualitas laporan keuangan juga akan semakin berkualitas.

Hasil penelitian Purboraras (2020) juga menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah maka pegawai harus memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah yang ada dengan semaksimal mungkin. Jadi jika pegawai semakin memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah maka kecenderungan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan tepat, akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian Zulfah & Wahyuni (2017), memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan. Hubungannya sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan karena laporan keuangan yang

dibuat sudah standar dengan peraturan pemerintahan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kualitas pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid.

4.3.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel sistem pengendalian internal (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kota Jambi. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kota Jambi mempunyai arti bahwa semakin tinggi sistem pengendalian internal pemerintah di BPKAD Kota Jambi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah Kota Jambi. Dalam PP No. 60 Tahun 2008 adalah sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Data penelitian yang dikumpulkan dari 54 responden menunjukkan informasi bahwa sebanyak 46 responden setuju dan sangat setuju pada pernyataan “Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada BPKAD Kota Jambi terus menerus diperbaharui untuk mencegah timbulnya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang ingin melakukan kecurangan.

Selain itu, hal ini dilakukan agar pencapaian tujuan organisasi tidak mengalami kendala yang berarti.

Terdapat sebanyak 46 responden yang setuju dan sangat setuju pada pernyataan “Pegawai dan atasan telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah diterapkan dan dipahami oleh setiap pegawai baik pemimpin serta para pegawai yang ada di BPKAD Kota Jambi. Adanya kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan dalam menerapkan pengendalian internal diharapkan dapat meminimalkan kesalahan maupun kecurangan akuntansi sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Terdapat sebanyak 49 responden yang setuju dan sangat setuju pada pernyataan “Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukan adanya kelemahan dan perlu perbaikan”. Hal ini menunjukkan bahwa BPKAD Kota Jambi secara rutin melakukan pengendalian dalam mereviu dan mengevaluasi setiap temuan yang ada dan melakukan upaya perbaikan guna menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

Adanya sistem pengendalian yang baik dapat menurunkan risiko terjadinya kesalahan ataupun kecurangan dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik dan berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Dewi (2020), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Apabila sistem pengendalian internal suatu organisasi lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sangat besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Dewi (2020), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, sistem pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data

dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian Saddam (2021), hasil positif dalam penelitian ini menunjukkan jika sistem pengendalian internal meningkat maka kualitas informasi laporan keuangan juga akan semakin baik. Hasil variabel sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Karena kualitas informasi laporan keuangan membutuhkan sistem pengendalian internal untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, untuk menghindari dari kecurangan manipulasi angka-angka yang dapat merugikan masyarakat dan negara, serta memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

4.3.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel kompetensi sumber daya manusia (X_3) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,578 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kota Jambi. Sesuai dengan hasil pengumpulan keusioner pada BPKAD Kota Jambi, hasil jawaban responden menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan BPKAD Kota Jambi. Hal ini tidak sejalan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 November 2003 yang mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Sesuai dengan tabel 4.4 diketahui bahwa dari 54 responden sebanyak 9 orang (16.7%) yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SEDERAJAT, 6 orang (11.1%) memiliki pendidikan terakhir Diploma, 33 orang (61.1%) memiliki

pendidikan terakhir S1, 5 orang (9.3%) memiliki pendidikan terakhir S2, dan terdapat 1 orang (1.9%) yang tidak mencantumkan pendidikan terakhir pada data responden. Dari 54 responden yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebanyak 9 responden atau setara dengan 17%, sedangkan lainnya 45 orang atau 83% bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi. Hal ini dapat mendukung hasil penelitian ini dimana kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kota Jambi. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPKAD Kota Jambi sebagian besar masih belum memahami akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang baik. Input yang kurang memadai tentu akan sulit untuk menghasilkan output yang berkualitas, terutama laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil jawaban responden menunjukkan bahwa pegawai di BPKAD Kota Jambi masih kurang akan kesadaran pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pegawai akan pentingnya kompetensi sumber daya manusia yaitu berupa pelatihan yang diperlukan untuk mempertahankan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dari ilmu yang kian semakin berkembang. Meskipun pegawai di BPKAD Kota Jambi memiliki latar belakang pendidikan yang didominasi dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1), pelatihan kepegawaian sangat diperlukan dalam memaksimalkan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Pelatihan mengenai hal keuangan juga diperlukan oleh setiap pegawai guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, sehingga pegawai pada BPKAD Kota Jambi mampu memaksimalkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Data penelitian yang dikumpulkan dari 54 responden menunjukkan informasi bahwa sebanyak 36 responden setuju dan sangat setuju pada pernyataan “Sebagian besar sumber daya manusia pengelola keuangan yang bekerja di BPKAD Kota Jambi berlatar belakang pendidikan keuangan”. Sebanyak 18 responden memilih cukup setuju dan tidak setuju pada pernyataan

di atas, hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran responden akan pentingnya latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia dalam menunjang kualitas suatu laporan keuangan. SDM yang berkompoten dapat diketahui dari latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan pelatihan yang tepat sesuai dengan bidang tugas yang dijalankannya (Leiwakabessy, 2018).

Data penelitian yang dikumpulkan dari 54 responden menunjukkan informasi bahwa sebanyak 46 responden setuju dan sangat setuju pada pernyataan “Pegawai yang bekerja di BPKAD Kota Jambi telah memahami teori-teori yang berkaitan dengan keuangan”. Dalam halnya pembuatan laporan keuangan yang dibutuhkan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, diperlukan pengetahuan yang menguasai teori-teori yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan agar pada saat pembuatan suatu laporan keuangan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Data penelitian yang dikumpulkan dari 54 responden menunjukkan informasi bahwa sebanyak 45 responden setuju dan sangat setuju pada pernyataan “Sumber daya manusia pengelola keuangan yang bekerja di BPKAD Kota Jambi telah memahami aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku. Meskipun sebagian besar pegawai memahami aturan dalam penyusunan laporan keuangan, namun kompleksitas penyusunan laporan keuangan memerlukan keahlian khusus bagi pegawai untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kurangnya kompetensi SDM pada BPKAD Kota Jambi dalam hal akuntansi tentu menjadi hambatan tersendiri bagi para pegawai untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnaen & Albastiah (2021) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan data demografi responden, terdapat fakta bahwa dari segi jumlah, ada setiap satuan kerja hanya memiliki satu bendahara yang pada umumnya lulusan Sekolah Menengah Atas dan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas yang

umum dan fungsi yang masih sederhana. Proses akuntansi hanya dapat dilakukan oleh pegawai yang memiliki ilmu akuntansi, namun kenyataan yang ditemukan di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan pendidikan. Selain itu kelemahan lainnya adalah kurangnya pelatihan-pelatihan dan pendidikan dalam penyelenggaraan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Leiwakabessy (2018) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan instrumen pertanyaan yang digunakan dapat dinyatakan bahwa SDM yang berkompeten dapat diketahui dari latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan dan pelatihan yang tepat sesuai dengan bidang tugas yang dijalankannya. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah akan semakin baik ketika Sumber Daya Manusia yang menghasilkan laporan tersebut memiliki kompetensi yang memadai.

Begitupula penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati et al. (2020), juga menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bagus kualitas sumber daya manusia maka akan semakin meningkat juga kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kinerja setiap karyawan di suatu perusahaan atau instansi. Setiap karyawan harus memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan khusus, dan sikap teliti terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya. Dengan karakteristik tersebut maka tugas yang dilakukan akan lebih efisien dan meningkatkan kualitas kerja karyawan.

4.3.4 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel komitmen organisasi (X_4) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,083 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Kota Jambi. Sesuai dengan hasil pengumpulan keusioner pada BPKAD Kota Jambi, hasil jawaban responden menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan BPKAD Kota Jambi. Diperlukannya suatu komitmen dalam organisasi guna untuk mengembangkan dan memelihara informasi akuntansi merupakan bagian integral dari pelayanan dan pengambilan keputusan. Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pegawai atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pegawai membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi (Saifudin & Aprilia, 2020).

Data penelitian yang dikumpulkan dari 54 responden menunjukkan informasi bahwa sebanyak 47 responden setuju dan sangat setuju pada pernyataan “Merasa bangga menjadi pegawai organisasi saat ini”. Hal ini menunjukkan bahwa para pegawai telah memiliki komitmen organisasi yang baik salah satunya adalah merasa bangga menjadi bagian dari BPKAD Kota Jambi. Data menunjukkan informasi bahwa sebanyak 42 responden setuju dan sangat setuju pada pernyataan “Memberikan ide-ide baru yang menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas”. Merasa bangga dan memberikan ide – ide baru demi kemajuan kinerja organisasi juga merupakan wujud dari komitmen dalam berorganisasi. Data penelitian menunjukkan informasi bahwa sebanyak 47 responden setuju dan sangat setuju pada pernyataan “Mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan pegawai”. Para pegawai wajib untuk meningkatkan kemampuan personal untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan. Berusaha untuk memberikan hasil kerja yang terbaik bagi organisasi.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Widari & Sutrisno (2017), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut

menyatakan bahwa ketika seorang pegawai mempunyai komitmen yang tinggi terhadap apa yang menjadi pencapaian tujuan organisasinya maka akan semakin baik *output*-nya, begitupula sebaliknya, terkait dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja perangkat daerah, dengan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah maka akan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai SAP.

Begitupula hasil penelitian yang dilakukan oleh Yani (2022), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin tingginya komitmen organisasi yang dimiliki pegawai OPD Kabupaten Gianyar, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik.

Hasil penelitian yang dilakukan di BPKAD Kota Jambi menyatakan bahwa tidak berpengaruhnya komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan, hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifudin & Aprilia (2020) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan disebabkan karena kurangnya kemampuan individu dalam menyajikan laporan keuangan dan kurangnya kemauan individu dalam berusaha untuk mencapai tujuan organisasi sehingga tidak terjalin adanya komitmen antara individu dengan organisasi. Jika individu tidak komitmen terhadap organisasinya memungkinkan dalam melaksanakan tugasnya dibidang akuntansi tidak bekerja secara maksimal dan tujuan yang dicapai organisasi tersebut kurang memuaskan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di BPKAD Kota Jambi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kota Jambi.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kota Jambi.
3. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kota Jambi.
4. Komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kota Jambi.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian, yaitu:

1. Hasil penelitian terbatas pada pegawai di BPKAD Kota Jambi, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan pada lingkungan BPKAD lainnya. Di samping itu, sebagian besar responden merupakan karyawan tidak tetap sehingga tidak memiliki pengalaman kerja yang lama dan belum mengenal lingkungan kerja di BPKAD Kota Jambi secara menyeluruh. Hal ini tentu dapat berdampak pada respon jawaban yang diberikan.
2. Penelitian ini terbatas pada 4 (empat) variabel independen, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi dan masih banyak variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini serta pengaruhnya terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian berikutnya.

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian tidak terbatas hanya pada BPKAD di Kota Jambi saja.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel baru yang diduga memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adifitya, Jajang. (2014). Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bukit Makmur Mandiri Utama Site Kideco Jaya Agung Batu Kajang Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2014, 2 (4): 833-845 ISSN 2355-5408, ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id.
- APB. (2002). Statement No. 4, *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Bussiness Enterprice*.
- Aprilia, Ayu. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada OPD Provinsi Sumatera Selatan). Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Artana, A. S. (2016). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Bodnar, George H., William S. Hopwood. (2000). *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi VI, Terjemahan Amir AJ, Rudi M.T. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, Elasanti. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Pengendalian Intern Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Demak). Undergraduate thesis, Universitas Stikubank.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1-23.
- Erlina, Sri Mulyani. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cetakan Pertama USU Press, Medan.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2018. <https://doi.org/Nahkoda> Leadership dalam organisasi konservasi
- Hall, James A. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat.

- Hamdani, S. (2011). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Universitas Komputer Indonesia, Bandung
- Harahap, Sofyan, Syafri. (2002). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hernanda, L. T., & Setiyawati, H. (2020). Pengaruh komitmen organisasi, pelaksanaan anggaran dan implementasi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. 01(02).
- Ihsanti, Emilda. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). Jurnal akuntansi 2.3.
- Ikhsan, Arfan. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Bandung: Citapustaka Media.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Irham, Fahmi. (2012). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Isnaen, F., & Albastiah, F. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Wilayah Jakarta Barat. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Karyanti, Tutik D. (2010). Pengaruh Kejelasan Sasaran, Desentralisasi, dan Sistem Pengukuran terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris di Politeknik Negeri Semarang). Tesis. Universitas Dipenogoro.
- Kiranayanti, I. E., dan Erawati, N. A. (2016, Agustus). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1290-1318.
- Komarasari, W. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. 12.
- Kurniawati, E., Askandar, N. S., & Junaidi. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen

- Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Pemerintahan Kota Baru).8, 149–160.
- Laudon, K. C., dan Laudon, J. P. (2000). *Management Information Systems, organization and Technology in The Networked Enterprise*. New Jersey: PrenticeHall.
- Leiwakabessy, T. F. F. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Proses Pelaporan Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya. 214–224.
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 11(2), 170–178. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>
- Lubis., A.I. (2010). Akuntansi keberlakuan. Jakarta: Salemba Empat.
- Lubis, Putri Syukria. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PD. Pasar Kota Medan. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU.
- Mahaputra, I Putu U, R., dan I Wayan, P. (2014). Analisis Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2 : 230-244.
- Maksyur, Noprial Valenra. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu).JOM. FEKON Vol. 2 No. 2.
- Marshall B. Romney dan Paul John. (2014). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.
- Munawir, Slamet. (2002). Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Mutiana, L., Diantimala, Y., dan Zuraida. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 3(2).
- Nordiawan, Deddi. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.

- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajbrial Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pujanira, Putriasri. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purboraras, sella antika. (2020). Pengaruh Kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan SIA Keuangan Daerah, Pelatihan dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Blitar). *Advanced Quantitative Research Methods for Urban Planners*, 185–215.
- Qomah, Siti., dan Ismunawan. (2021). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. ISSN : 2339-0832 (Online) Volume. 8 Nomor. 1.
- Rama, Dasaratha V., dan Jones, Frederick L. (2006). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rusvianto, D., Mulyani, S., dan Yuliafitri, I. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah DAN Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung). Universitas Padjajaran Bandung.
- Roviyantie, D. (2011). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Universitas Siliwangi.

- Saddam, R. Al. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v3i1.1147>
- Safridha, Mutia Aulia. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Saifudin, S., & Aprilia, R. N. (2020). Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang. *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 14(1), 9. <https://doi.org/10.33795/j-adbis.v14i1.83>
- Santoso, Singgih. (1999). SPSS Mengolah Data Statistik secara Profesional. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santoso, Singgih. (2012). Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik. Jakarta: Gramedia.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business. In Research Methods For Business (Keempat)*. Salemba Empat.
- Setyowati, Lilis., Wikan I., dan Ririh D, P. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *KINERJA*, Volume 20, No.2, Hal. 179-191.
- Silviana, A. E. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten Di Seluruh Jawa Barat. *Jurnal Nasional Dosen Universitas Widyatama*, 6(1), 24–36. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/7301>
- Siregar, Syofiyen. (2016). Statistika Deskriptif untuk Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekidjan. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Agsara.
- Sopiah. (2008). Komitmen Organisasi. *Jurnal Standar Akuntansi Pemerintah No*

71 Tahun

- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-23. Bandung. Alfabeta.
- Sundjaja, S., Ridwan, dan Barlian, Inge. (2002). Manajemen Keuangan Satu, Edisi Keempat, Jakarta, Prenhallindo.
- Susanto, Azhar. (2013). Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya.
- Sutrisno, Edy. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Prenadamedia.
- Suwardjono. (2008). Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan. BPFE-YOGYAKARTA: Yogyakarta.
- Syarifudin, Akhmad. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02.
- Tarigan, Akmal Azhari. (2011). Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Medan: La Tansa Press.
- Teguh, Muhammad. (2014). Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Indonesia.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Untary, Nurendah R. (2015). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang). Universitas Diponegoro Semarang.
- Wibowo. (2015). Perilaku Dalam Organisasi. Penerbit PT Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Widari, L., & Sutrisno. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 5, 1–23.

www.jambi.bpk.go.id, <https://jambi.bpk.go.id/lhp-lkpd/> (diakses pada tanggal 22 Maret 2021).

Zulfah, I., & Wahyuni, S. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara Indana Zulfah, Sri Wahyuni dan Arina Nurfaza. 3(November), 46–57.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i Responden

Bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner dalam rangka penelitian saya yang berjudul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Jambi)”** secara sukarela, jujur, dan benar.

Kuesioner ini terdiri atas sejumlah pernyataan dari beberapa indikator variabel penelitian. Bapak/Ibu/Sdr/i ketahui bahwa, keberhasilan penelitian ini sangat tergantung pada partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi kuesioner.

Atas partisipasi dan kerjasama, saya mengucapkan terima kasih.

Jambi, 6 Juni 2023

Hormat Saya,

Ivana Kristina Hutasoit

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian:

1. Dimohon dengan hormat Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi identitas Anda secara lengkap, dan member tanda *checklist* (✓) pada tempat yang sudah disediakan.
2. Bacalah semua pernyataan dengan sebaik mungkin sebelum Anda menjawab.
3. Isilah semua pernyataan dalam kuesioner ini dengan memberi tanda *checklist* (✓) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia pada kolom pernyataan dengan criteria-kriteria sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

CS = Cukup Setuju

Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Lama Bekerja :

a) Kurang dari 1 tahun

b) 1-3 tahun

c) Lebih dari 3 tahun

☐
☐
☐

Contoh Pengisian :

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	CS	TS	STS
1	Pemanfaatan dan penguasaan terhadap teknologi komputerisasi adalah kemampuan dasar bagi tim penyusun laporan.				✓	

A. Sistem Informasi Akuntansi (X1)

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	CS	TS	STS
1	Pemanfaatan dan penguasaan terhadap teknologi komputerisasi adalah kemampuan dasar bagi tim penyusun laporan.					
2	Teknologi informasi merupakan alat yang berfungsi untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan dengan mempermudah dan mempercepat serta menciptakan keakuratan hasil, berupa laporan keuangan.					
3	Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.					
4	Pemanfaatan teknologi informasi membuka peluang untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat.					
5	Dalam melaksanakan tugas PPK SKPD memiliki jumlah komputer yang cukup.					
6	Alat-alat yang digunakan dalam perusahaan yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi dapat dikatakan efektif untuk melindungi asset perusahaan.					
7	Perusahaan mengharuskan karyawan untuk memahami prosedur Sistem Informasi Akuntansi.					
8	Setiap data transaksi selalu diproses secara periodik.					

Sumber : Nurul (2020)

B. Sistem Pengendalian Internal (X2)

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	CS	TS	STS
1	Pimpinan selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai.					
2	Pimpinan OPD secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern.					
3	Pimpinan OPD selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku.					
4	Pimpinan OPD selalu melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang.					
5	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.					
6	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.					
7	Pegawai dan atasan telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian.					
8	Semua transaksi yang diinput dan diproses ke dalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi.					
9	Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik.					
10	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat					

11	Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan.					
12	Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, OPD telah melakukan perbaikan pengendalian intern.					
13	OPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/ revidi dan saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat					
14	Pimpinan selalu merevidi dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan					

Sumber : Sudiarianti, 2015.

C. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	CS	TS	STS
1	Sebagian besar sumber daya manusia pengelola keuangan yang bekerja di BPKAD Kota Jambi berlatar belakang pendidikan keuangan.					
2	Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan, sehingga kecakapan manajerial pegawai sumber daya manusia pengelola keuangan BPKAD Kota Jambi meningkat.					
3	Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan keuangan, sehingga pelayanan dari sumber daya manusia pengelola keuangan BPKAD Kota Jambi meningkat.					
4	Pegawai yang bekerja di BPKAD Kota Jambi telah memahami teori-teori yang berkaitan dengan keuangan.					
5	Sumber daya manusia pengelola keuangan yang bekerja di BPKAD Kota Jambi telah memahami aturan-aturan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku. (PP No. 70 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah).					
6	Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil laporan keuangan.					

Sumber : Mutia (2020)

D. Komitmen Organisasi (X4)

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	CS	TS	STS
1	Pegawai di bagian keuangan/Akuntansi memiliki usaha yang tinggi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.					
2	Penyelesaian laporan selalu tepat waktu.					
3	Bagian keuangan/akuntansi fokus pada kualitas laporan keuangan.					
4	Setiap pegawai bagian keuangan/akuntansi disarankan membaca dan mempelajari Sistem Akuntansi Pemerintah.					
5	Merasa bangga menjadi pegawai organisasi saat ini.					
6	Menjadikan kepentingan dalam organisasi saat ini setara dengan kepentingan pribadi.					
7	Memberikan ide-ide baru yang menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.					
8	Memberikan waktu, kemampuan dan ilmu secara totalitas saat bekerja.					
9	Seluruh pegawai mengetahui struktur organisasi.					
10	Mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan pegawai					

Sumber : Fitri (2018)

E. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	CS	TS	STS
1	Laporan keuangan yang saya susun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.					
2	Laporan Keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.					
3	Informasi dalam laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna dimasa lalu (<i>feedback value</i>).					
4	Informasi dalam laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang (<i>predictive Value</i>).					
5	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
6	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
7	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan, teruji kebenarannya.					
8	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan yang saya buat telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah.					
9	Informasi yang dihasilkan dalam laporan OPD yang saya susun tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.					

10	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
11	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.					
12	Saya selalu menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.					
13	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna.					
14	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun, disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					
15	Laporan Keuangan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.					

Sumber : Sudiarianti, 2015.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Raya Jambi-Ma Bulian, KM. 15, Mendalo Indah Kode Pos 36361
 Laman : www.unja.ac.id

Nomor : 975 /UN21.5/PK.02.01/2021
 Hal : Mohon Bantuan Data/Informasi

29 APR 2021

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi
 JL. Jend. Basuki Rahmat, Handil Jaya, Kec. Jelutung

Dengan hormat, sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (skripsi) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi atas :

Nama : Ivana Kristina Hutasoit
 NIM. : C1C017094
 Jurusan : Akuntansi
 Semester : VIII (delapan)

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan data/informasi kepada mahasiswa yang bersangkutan guna penyelesaian tugas akhir (skripsi) dengan judul "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Jambi)".

Demikian disampaikan atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



 Dr. H. Janadi, S.E., M.Si.
 NIP. 196706021992031003

Lampiran 3 Tabulasi Kuesioner

N o	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4
1	4	4	4	4	5	5	4	5	4,38	4	4	4	4
2	4	4	5	4	4	3	3	5	4,00	4	3	5	4
3	5	5	5	5	4	4	3	5	4,50	5	5	5	2
4	3	5	5	4	5	4	5	4	4,38	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	4	4	4,75	4	4	4	3
6	5	5	5	5	4	4	5	5	4,75	5	4	5	5
7	4	5	5	4	4	3	3	4	4,00	4	4	5	4
8	5	5	4	4	4	5	5	5	4,63	4	4	5	5
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5	4	5	4
10	5	5	5	5	5	5	4	4	4,75	4	4	4	3
11	4	5	4	4	3	3	3	5	3,88	5	5	5	2
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	4	5	5	3
13	5	5	5	5	4	4	5	5	4,75	5	4	4	3
14	5	5	5	5	4	4	4	5	4,63	4	4	4	3
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5
17	4	4	4	4	4	3	5	3	3,88	5	4	5	4
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5
20	5	5	4	4	4	4	4	4	4,25	4	5	4	4
21	5	5	4	4	4	4	4	4	4,25	4	5	4	4
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5
23	4	3	3	3	3	3	3	3	3,13	4	3	3	3
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	4	5
26	5	5	5	5	5	5	3	5	4,75	5	4	5	5
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3

[illegible]

N o	X3. 2	X3. 3	X3. 4	X3. 5	X3. 6	X3	X4. 1	X4. 2	X4. 3	X4. 4	X4. 5	X4. 6	X4. 7
1	4	4	4	4	4	3,43	4	5	4	5	4	4	4
2	5	5	5	4	4	3,86	5	5	4	4	5	4	4
3	4	4	4	4	4	3,71	5	5	5	5	5	2	5
4	3	3	2	3	4	3,00	5	5	5	4	3	3	3
5	4	4	4	5	4	4,29	5	5	5	5	5	4	3
6	5	5	5	5	5	5,14	5	5	5	4	5	4	5
7	4	4	4	3	5	4,29	5	5	4	4	5	5	4
8	5	5	4	5	5	5,14	5	5	5	5	5	4	5
9	5	5	5	5	5	5,43	5	5	5	5	5	5	5
10	4	4	4	5	4	5,00	5	5	5	5	5	4	3
11	4	4	3	3	3	4,43	5	5	5	5	4	4	4
12	5	5	4	4	5	5,57	5	4	5	4	4	4	4
13	5	4	4	4	4	5,43	5	5	3	4	5	3	5
14	5	5	4	5	4	5,86	5	5	5	5	5	5	5
15	5	5	5	5	5	6,43	5	5	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	5	6,43	5	5	5	5	5	5	5
17	4	4	4	4	4	5,86	4	4	3	3	2	3	3
18	5	5	5	5	5	6,86	5	5	5	5	5	5	5
19	5	4	5	5	5	6,86	5	5	5	5	4	5	5
20	5	4	4	4	4	6,57	5	4	4	4	5	3	4
21	5	4	4	4	4	6,71	5	4	4	4	5	3	4
22	5	5	5	5	5	7,43	5	5	5	5	5	5	5
23	4	4	4	3	3	6,43	4	4	3	3	4	3	3
24	5	5	5	5	5	7,71	5	5	5	5	5	5	5
25	5	5	5	5	5	7,86	5	4	5	5	5	4	5
26	5	5	5	5	5	8,00	5	5	5	4	5	5	5
27	3	3	3	3	3	6,43	3	3	3	3	3	3	3

N o	X4. 7	X4. 8	X4. 9	X4.1 0	X4	Y1. 1	Y1. 2	Y1. 3	Y1. 4	Y1. 5	Y1. 6	Y1. 7	Y1. 8
1	4	4	4	4	3,91	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	3	4	4,00	4	4	3	2	4	4	4	4
3	5	3	3	4	4,09	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	1	4	3	3,64	5	5	5	4	4	4	4	4
5	3	4	5	4	4,55	5	5	5	4	4	5	4	4
6	5	5	5	5	4,91	5	5	5	5	4	4	4	5
7	4	5	5	4	4,82	4	4	4	4	4	4	4	4
8	5	4	4	5	5,00	5	5	4	4	5	5	5	5
9	5	5	5	4	5,27	5	5	5	4	4	5	5	5
10	3	4	5	4	5,00	5	5	5	4	4	5	4	4
11	4	5	4	4	5,09	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	5	5	4	5,09	5	5	5	5	5	5	5	5
13	5	5	4	4	5,09	5	5	5	5	4	4	4	4
14	5	5	5	5	5,82	5	5	5	5	5	5	5	5
15	5	5	5	5	5,91	5	5	5	5	5	5	5	5
16	5	5	5	5	6,00	5	5	5	5	5	5	5	5
17	3	4	4	4	4,64	5	5	5	5	5	5	5	5
18	5	5	5	5	6,18	5	5	5	5	5	5	5	5
19	5	5	5	5	6,18	5	5	5	5	5	5	5	5
20	4	4	5	4	5,64	5	5	5	4	5	4	4	5
21	4	4	5	4	5,73	5	5	5	4	5	4	5	5
22	5	5	5	5	6,55	5	5	5	5	5	5	5	5
23	3	3	3	3	5,09	3	3	3	3	3	3	3	3
24	5	5	5	5	6,73	5	5	5	5	5	5	5	5
25	5	5	5	5	6,64	5	5	5	4	5	5	5	5
26	5	5	4	5	6,73	5	5	5	5	5	5	5	5
27	3	3	3	3	5,18	3	3	3	3	3	3	3	3

No	Y1.9	Y1.10	Y1.11	Y1.12	Y1.13	Y1.14	Y1.15	Y1
1	4	4	4	4	4	4	4	3,81
2	4	5	5	3	4	4	4	3,75
3	4	4	4	2	4	4	4	3,81
4	4	4	4	4	4	4	4	4,19
5	4	4	4	4	4	4	4	4,31
6	4	5	5	5	4	5	5	4,75
7	4	5	5	5	4	4	5	4,44
8	5	5	5	5	5	5	5	5,06
9	5	5	5	5	5	5	5	5,13
10	4	4	4	4	4	4	4	4,63
11	4	5	5	5	4	4	4	4,63
12	5	5	5	4	5	5	5	5,38
13	4	4	4	4	4	4	4	4,81
14	5	5	5	2	5	5	5	5,38
15	5	5	5	5	5	5	5	5,63
16	5	5	5	5	5	5	5	5,69
17	5	5	5	5	5	5	5	5,75
18	5	5	5	5	5	5	5	5,81
19	5	5	5	4	5	4	5	5,75
20	5	5	4	4	4	4	4	5,44
21	5	5	4	4	4	4	4	5,56
22	5	5	5	5	5	5	5	6,06
23	3	3	3	3	3	3	3	4,25
24	5	5	5	5	5	5	5	6,19
25	5	5	5	5	5	5	5	6,19
26	5	5	5	5	5	5	5	6,31
27	3	3	3	3	3	3	3	4,50

N o	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1	X2. 1	X2. 2	X2. 3	X2. 4
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3
29	3	4	4	4	4	4	4	3	3,75	3	3	3	3
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4
31	5	5	5	5	4	4	4	4	4,50	5	5	5	5
32	5	5	5	5	4	4	4	4	4,50	5	5	5	5
33	4	5	4	5	4	4	5	4	4,38	5	5	5	5
34	5	4	4	4	4	5	5	5	4,50	5	4	4	5
35	5	5	5	5	4	4	3	3	4,25	4	4	4	4
36	5	5	5	4	5	5	4	4	4,63	5	5	5	5
37	5	5	5	5	4	4	4	4	4,50	5	5	5	5
38	4	4	3	5	4	5	4	4	4,13	4	3	3	3
39	5	5	5	5	4	4	4	4	4,50	5	5	5	5
40	5	5	5	5	4	4	4	4	4,50	5	5	5	5
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	4
42	5	4	4	4	4	3	4	4	4,00	4	4	4	4
43	5	4	4	4	4	3	4	4	4,00	4	4	4	4
44	5	5	5	5	4	3	4	4	4,38	4	4	4	3
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5	5	5	5
47	4	4	5	4	4	4	4	4	4,13	4	4	4	2
48	5	5	4	4	5	5	5	4	4,63	5	5	5	4
49	5	5	5	5	4	4	5	5	4,75	5	5	5	5
50	4	4	3	4	3	2	4	3	3,38	3	3	3	3
51	5	5	5	5	4	4	4	4	4,50	5	5	5	5
52	5	4	3	4	4	3	3	4	3,75	4	4	4	4
53	2	5	5	3	4	2	5	4	3,75	3	2	2	2
54	5	5	5	5	4	4	4	4	4,50	5	5	5	5

No	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6
28	3	3	3	3	3	6,57	3	3	3	3	3	3
29	4	4	4	4	4	7,57	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	7,71	4	4	4	4	4	4
31	5	5	5	5	5	8,71	4	4	4	4	5	3
32	5	5	5	5	5	8,86	4	4	4	4	5	3
33	5	5	4	5	4	8,43	5	5	5	5	5	1
34	4	4	4	4	4	8,14	4	5	4	5	4	2
35	3	3	3	3	3	7,57	3	3	3	3	3	3
36	5	5	5	5	5	9,43	4	4	4	5	5	3
37	5	5	5	5	5	9,57	4	4	4	4	5	3
38	3	3	4	4	3	8,14	3	4	4	3	3	3
39	5	5	5	5	5	9,86	4	4	4	4	5	3
40	5	5	5	5	5	10,00	4	4	4	4	5	3
41	4	4	3	3	3	8,57	4	4	4	4	4	3
42	4	4	4	4	4	9,29	5	4	4	4	5	4
43	4	4	4	4	4	9,43	5	4	4	4	5	4
44	4	3	4	4	4	9,57	5	4	4	4	4	5
45	4	4	5	4	4	10,14	5	4	5	5	5	4
46	4	4	5	4	4	10,29	5	4	5	5	5	4
47	4	4	4	4	4	10,00	4	4	4	4	4	4
48	5	5	5	5	5	11,14	5	5	5	5	5	5
49	5	5	4	5	5	11,14	5	5	5	5	5	5
50	3	3	3	4	4	9,86	4	4	4	4	4	3
51	5	5	5	5	5	11,57	4	4	4	4	5	3
52	4	4	4	4	4	10,86	5	5	5	4	5	3
53	2	2	2	3	3	9,57	3	3	2	3	1	1
54	5	5	5	5	5	12,00	4	4	4	4	5	3

N o	X4. 7	X4. 8	X4. 9	X4.1 0	X4	Y1. 1	Y1. 2	Y1. 3	Y1. 4	Y1. 5	Y1. 6	Y1. 7	Y1. 8
28	3	3	3	3	5,27	3	3	3	3	3	3	3	3
29	4	4	4	4	6,27	3	3	3	3	3	3	3	3
30	4	4	4	4	6,36	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	5	5	5	6,73	5	5	5	5	5	5	5	5
32	4	5	5	5	6,82	5	5	5	5	5	5	5	5
33	5	4	5	5	7,09	4	4	5	4	5	4	4	4
34	4	4	4	5	6,82	5	4	4	5	5	5	4	4
35	3	3	3	3	5,91	3	3	3	3	3	3	3	3
36	3	4	5	5	7,09	4	5	5	5	5	4	4	5
37	4	5	5	5	7,27	5	5	5	5	5	5	5	5
38	4	4	4	4	6,73	3	4	4	4	4	4	4	3
39	4	5	5	5	7,45	5	5	5	5	5	5	5	5
40	4	5	5	5	7,55	5	5	5	5	5	5	5	5
41	3	4	4	4	7,18	5	5	4	4	4	4	4	4
42	4	4	5	4	7,73	5	5	4	4	4	4	4	4
43	4	4	5	4	7,82	5	5	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	7,82	4	4	3	4	4	4	3	4
45	5	5	4	4	8,27	5	5	5	4	5	4	5	5
46	5	5	4	4	8,36	5	5	5	4	5	4	5	5
47	4	4	4	4	7,91	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	5	4	5	8,73	4	5	5	5	5	5	4	5
49	5	5	4	5	8,91	5	5	5	5	5	5	5	5
50	3	4	3	3	7,82	4	4	4	4	4	3	4	4
51	4	5	5	5	8,55	5	5	5	5	5	5	5	5
52	4	4	4	5	8,73	4	4	4	4	4	4	5	4
53	3	5	3	2	7,18	2	4	4	4	4	4	4	4
54	4	5	5	5	8,82	5	5	5	5	5	5	5	5

No	Y1.9	Y1.10	Y1.11	Y1.12	Y1.13	Y1.14	Y1.15	Y1
28	3	3	3	3	3	3	3	4,56
29	3	3	3	3	3	3	3	4,63
30	4	4	4	4	4	4	4	5,63
31	5	5	5	5	5	5	5	6,63
32	5	5	5	5	5	5	5	6,69
33	5	5	4	4	4	5	5	6,19
34	5	5	4	4	4	5	5	6,38
35	3	3	3	3	3	3	3	5,00
36	5	5	5	4	5	4	5	6,63
37	5	5	5	5	5	5	5	7,00
38	4	4	4	4	4	4	4	6,00
39	5	5	5	5	5	5	5	7,13
40	5	5	5	5	5	5	5	7,19
41	4	4	4	4	4	4	4	6,44
42	5	4	4	3	4	4	4	6,50
43	5	4	4	3	4	4	4	6,56
44	4	4	4	4	4	4	4	6,38
45	5	5	5	5	5	5	5	7,38
46	5	5	5	5	5	5	5	7,44
47	4	4	4	4	4	4	4	6,69
48	5	4	4	4	4	4	5	7,25
49	5	5	5	5	5	5	5	7,75
50	4	4	4	3	4	4	4	6,75
51	5	5	5	5	5	5	5	7,88
52	4	4	4	4	4	4	4	7,06
53	4	4	4	4	4	4	4	6,94
54	5	5	5	5	5	5	5	8,06